

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Barito Kuala Tahun 2017-2022, sebagai dasar arah kebijakan dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk 5 tahun kedepan. Dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 mengatur tentang kewajiban daerah dalam penyusunan RPJPD, RPJMD dan Renstra SKPD, renja SKPD, serta RKPD, bahwa setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD sebagai bentuk penjabaran dari teknis pelaksanaan visi-misi-tujuan-sasaran serta indicator kinerja utama (IKU) Pemerintah Daerah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah disusun berdasarkan: (a) pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu; (b) kerangka pendanaan dan pagu indikatif, serta (c) pelaksanaan urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata dan kebutuhan masyarakat atau urusan yang menjadi tanggung jawab SKPD, serta (d) visi-misi hingga indicator kinerja utama pemerintah daerah tahun 2017-2022 yang harus didukung.

Dalam kedudukannya sebagai perangkat daerah, Sekretaris Daerah, berdasarkan Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati No. 1 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unsur Unsur Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Barito Kuala, Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan, pengoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah dan pelayanan administratif.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara konsisten untuk mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good government). Sekretariat Daerah sebagai suatu “organisasi birokrasi” memerlukan

kerangka kerja Strategis, dalam menghadapi dinamika penyelenggaraan tata kelola pemerintahan. Langkah dimaksud meliputi upaya peningkatan kemampuan (kompetensi) aparatur, kemampuan pemberian pelayanan dan upaya memfasilitasi bagi kepentingan pimpinan dan masyarakat melalui manajemen perencanaan strategis yang dituangkan dalam Rencana Strategis (*RENSTRA*). Rencana Strategis ini memberikan arah untuk memanfaatkan peluang nyata dan bertanggung-jawab dalam mengaktualisasikan peran, sesuai tugas, wewenang dan kewajiban.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah disusun dengan SMART (spesifik, measurable, achievable, realistic, time) dimana setiap kinerja terencana dan terinci dalam bentuk tindakan yang lebih "*Spesifik*", "*relevan*" dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah dengan mempertimbangkan berbagai kemampuan dan peluang yang ada terhadap segala ancaman dan hambatan pelaksanaan kinerja strategis. Namun demikian masih dapat dilaksanakan "*achievable*", dan dapat diukur tahap keberhasilannya "*measurable*" berdasarkan rentang waktu tertentu "*time*". Sehingga setiap visi, misi, tujuan, sasaran yang ada dapat diukur tingkat keberhasilannya. Pengukuran-pengukuran seperti ini akan memberikan batasan riil mengenai berhasil tidaknya visi dan misi pembangunan dilaksanakan sebagai tanggung jawab kinerja.

Pada akhirnya Rencana Strategis (*RENSTRA*) Sekretariat Daerah Tahun 2017-2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang digunakan oleh Sekretariat Daerah untuk menerjemahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kab. Barito Kuala Tahun 2017- 2022 Sesuai tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran terpilih dirumuskan kedalam strategi, kebijakan yang akan melahirkan program dan kegiatan prioritas yang akan diselenggarakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

## 1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Strategis (*RENSTRA*) Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala tahun 2017 - 2022 ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- 4) Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 Nomor 3);
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 16);
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor Nomor 3 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Kuala
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 Nomor 2);
- 9) Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat;
- 10) Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala.
- 11) Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/230/KUM/2018 tentang Penetapan Rencana Strategis 2017-2022 Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala.

### **1.3 Maksud Dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud**

Maksud penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022 adalah sebagai instrument perencanaan resmi bersifat Strategis, yang telah tersistematikakan sesuai tuntutan perkembangan peran dan fungsi Sekretariat Daerah serta dinamika tingkat permasalahan yang terjadi pada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala pada perioditas perencanaan tersebut.

#### **1.3.2 Tujuan**

Adapun tujuan umum penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 – 2022 adalah guna mewujudkan efektifitas pencapaian tujuan, sasaran beserta indikator sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2017-2022, berdasarkan tahapan-tahapan pelaksanaan program-kegiatan yang harus diselesaikan selama 2017-2022.

Sedangkan tujuan khusus diarahkan pada sasaran sebagai berikut,:

- 1) Sebagai dokumen dalam menentukan arahan bagi tahapan kinerja yang harus dilaksanakan Sekretariat Daerah Tahun 2017-2022.
- 2) Sebagai tolak ukur melakukan evaluasi internal atas pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintahan dan pembangunan Sekretariat Daerah, Kab. Barito Kuala.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah, Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 – 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Daftar Isi

- Bab I      Pendahuluan :
- 1.1 Latar Belakang
  - 1.2 Landasan Hukum
  - 1.3 Maksud dan Tujuan
  - 1.4 Sistematika Penulisan

- Bab II      Gambaran Pelayanan Sekretariat Daerah :
- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah
  - 2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah
  - 2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
  - 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah
- Bab III     Permasalahan dan Isu-isu Strategis Sekretariat Daerah ;
- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah
  - 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
  - 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
  - 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
  - 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
- Bab IV     Tujuan, Dan Sasaran
- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah
- Bab V      Strategi Dan Arah Kebijakan
- Bab VI     Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan
- Bab VII    Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.
- Bab VIII   Penutup

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

#### 2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah

##### 2.1.1 Tugas Pokok

Pada tahun 2016 dengan ditetapkannya Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala, sudah tidak berlaku lagi.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka diterbitkan Peraturan Bupati No. 1 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unsur Unsur Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Barito Kuala, dimana Sekretariat Daerah sebagai unsur staf mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan, pengoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah dan pelayanan administratif.

##### 2.1.2 Fungsi

Dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi utama:

- 1) Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah.
- 2) Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah.
- 3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah.
- 4) Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah, dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

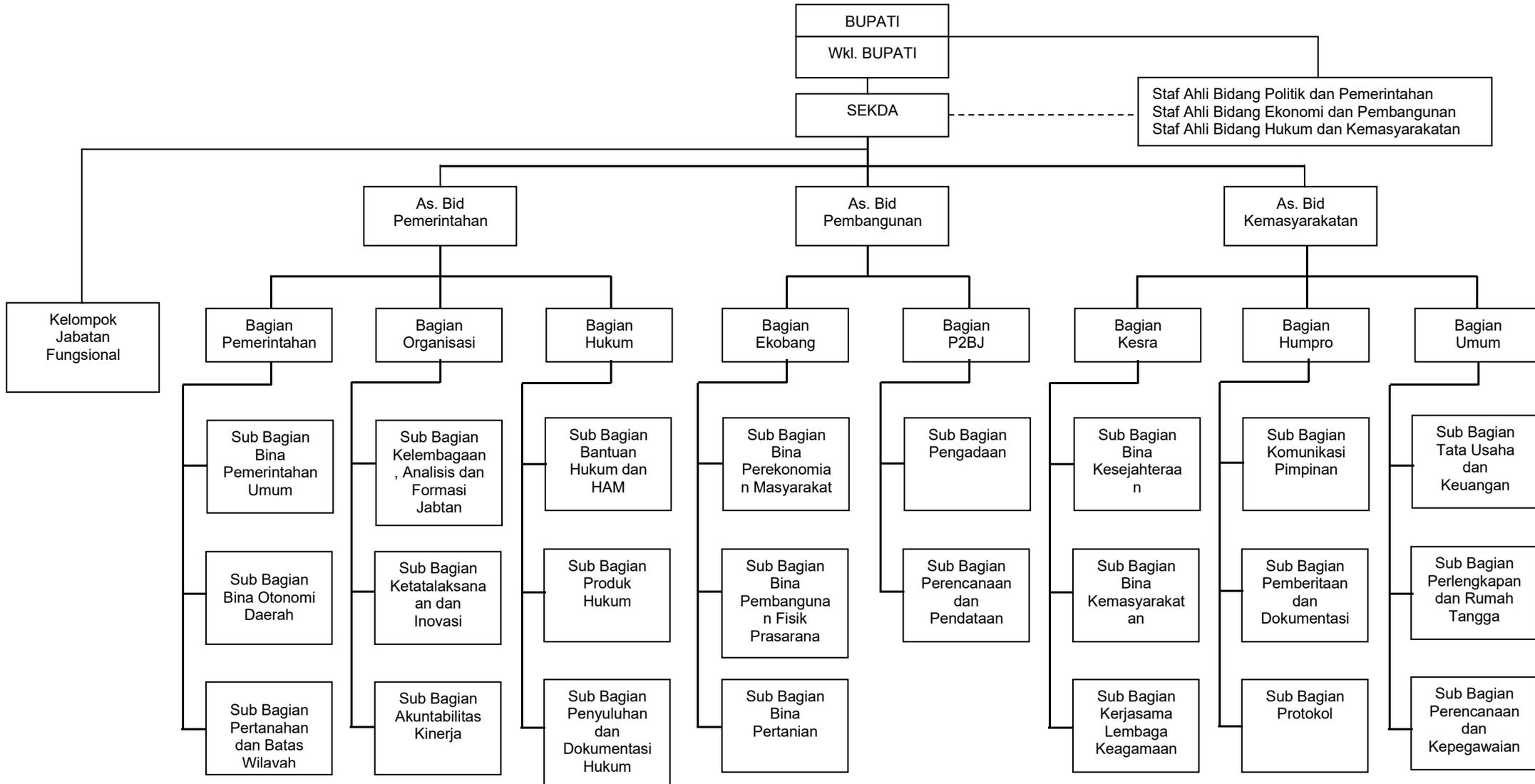
### 2.1.3 Struktur Organisasi

Unsur-unsur pelaksana tugas pada struktur organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Bidang Pemerintahan, terdiri dari :
  - 1) Bagian Pemerintahan, terdiri dari :
    - a) Subbagian Bina Pemerintahan Umum
    - b) Subbagian Bina Otonomi Daerah
    - c) Subbagian Pertanahan Dan Batas Wilayah
  - 2) Bagian Organisasi, terdiri dari :
    - a) Subbagian Kelembagaan, Analisis Dan Formasi Jabatan
    - b) Subbagian Ketatalaksanaan dan Inovasi
    - c) Subbagian Akuntabilitas Kinerja
  - 3) Bagian Hukum, terdiri dari :
    - a) Subbagian Bantuan Hukum Dan HAM
    - b) Subbagian Produk Hukum
    - c) Subbagian Penyuluhan dan Dokumentasi Hukum
- c. Asisten Bidang Pembangunan, terdiri dari :
  - 1) Bagian Ekonomi Dan Pembangunan, terdiri dari :
    - a) Subbagian Bina Perekonomian Masyarakat
    - b) Subbagian Bina Pembangunan Fisik Prasarana
    - c) Subbagian Bina Pertanian
  - 2) Bagian Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari :
    - a) Subbagian Perencanaan Dan Pendataan
    - b) Subbagian Pengadaan
- d. Asisten Bidang Kemasyarakatan, terdiri dari :
  - 1) Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
    - a) Subbagian Bina Kesejahteraan
    - b) Subbagian Bina Kemasyarakatan
    - c) Subbagian Kerjasama Lembaga Keagamaan
  - 2) Bagian Humas Dan Protokol, terdiri dari :
    - a) Subbagian Komunikasi Pimpinan Daerah
    - b) Subbagian Pemberitaan dan Dokumentasi

- c) Subbagian Protokol
- 3) Bagian Umum, terdiri dari :
  - a) Subbagian Perencanaan Dan Kepegawaian
  - b) Subbagian Tata Usaha Dan Keuangan
  - c) Subbagian Perlengkapan Dan RumahTangga

Bagan I  
Struktur Organisasi Sekretariat Daerah



## 2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah

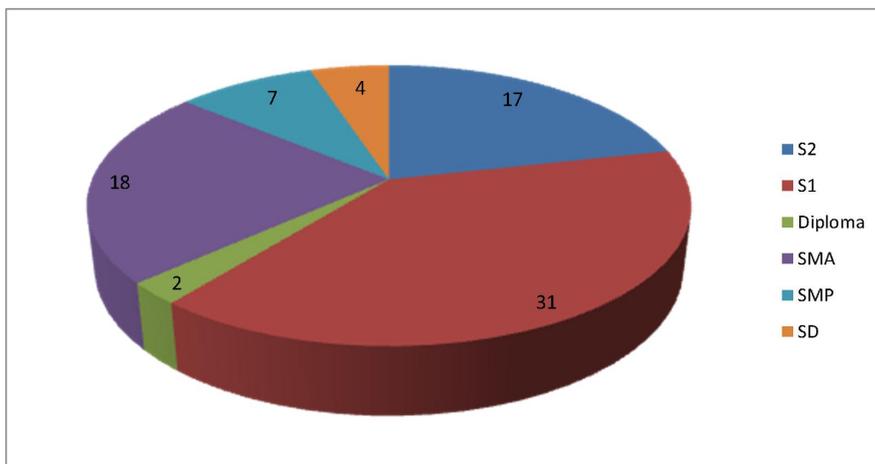
### 2.2.1 Tingkat Pendidikan Aparatur

Latar belakang pendidikan pegawai secara umum merupakan salah satu indikator awal untuk mengukur kompetensi pegawai, menjamin terlaksana dan tercapainya kinerja masing-masing pegawai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat. Hal ini terjadi jika penempatan pegawai sesuai dengan prinsip *"The Right Man On The Right Place"*, namun demikian seiring bertambahnya pengalaman dan kinerja pegawai yang berbeda-beda di lapangan kadang mempengaruhi penempatan pegawai pada bidang dan sub bidang kerja/tugas tertentu.

Seiring dengan lamanya rentang waktu antara pendidikan dengan kondisi pegawai saat ini, dikaitkan pula dengan dinamika perubahan kebijakan ketata pemerintahan yang terjadi menyebabkan adanya kesenjangan pengetahuan terhadap pemahaman atas segala kebijakan yang ada, baik secara administrasi maupun teknis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah. Kondisi seperti ini tentu saja akan berimbas pada turunnya kemampuan kerja aparatur.

PNS di Sekretariat Daerah sesuai tingkat pendidikan yang telah ditempuh dan telah diakui dengan diterbitkannya surat keputusan pencantuman gelar, dari 79 PNS yang ada, terdapat sebanyak 17 orang (22 %) dengan pendidikan S2, 31 orang (39 %) dengan pendidikan S1, 2 orang (3 %) dengan pendidikan Diploma, 18 orang (23 %) dengan pendidikan SMA, 7 orang (9%) dengan pendidikan SMP dan 4 orang (5%) dengan pendidikan SD.

**Grafik 2.1**  
**Proporsi PNS Di Lingkup Sekretariat Daerah Berdasarkan Pendidikan**



*Sumber : Data yang diolah*

### 2.2.2 Penempatan Aparatur

Untuk mengetahui bagaimana keberadaan PNS di lingkup Sekretariat Daerah dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dapat dilihat dari berbagai sisi ;

- 1) Jumlah Aparatur (PNS) yang bertugas di Sekretariat Daerah sebanyak 79 orang, dengan 62 laki-laki dan 17 wanita.
- 2) Komposisi jumlah laki-laki dan perempuan yang menduduki jabatan eselon di lingkup Sekretariat Daerah
  - a) Dari Jabatan struktural untuk eselon IIB yang berjumlah 6 jabatan, terisi sebanyak 4 jabatan seluruhnya terisi oleh laki-laki.
  - b) Untuk jabatan eselon IIIA yang berjumlah 8 jabatan, terisi 7 orang seluruhnya oleh laki-laki.
  - c) Untuk jabatan eselon IVA yang berjumlah 23 jabatan, terisi sebanyak 19 jabatan. Terdiri dari 17 orang laki-laki dan 2 orang perempuan.
- 3) Penempatan PNS per Bagian dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit kerja (Bagian-Bagian) di Sekretariat Daerah.
  - a) Persebaran penempatan PNS pada masing-masing Bagian di Sekretariat Daerah belum lah merata dan berimbang. Khususnya pada

bagian Ekonomi Pembangunan dan Bagian Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa PNS yang dimiliki masih sangat terbatas dalam mendukung kinerja Bagian, bahkan untuk Bagian Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa masing-masing pejabat struktural tidak memiliki pejabat non angka kredit di bawahnya, hal ini tentu saja akan cukup berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan kinerja kegiatan-kegiatan administrasi dan teknis dimasing-masing Bagian.

- b) PNS di Sekretariat Daerah lebih terpusat pada Bagian Umum dengan 32 orang PNS dan Bagian Humas dan Protokol sebanyak 14 orang PNS.
- c) Untuk itu kedepan diperlukan penataan penempatan PNS pada setiap unit kerja lingkup Sekretariat Daerah yang disesuaikan dengan Analisis Beban Kerja masing-masing jabatan.

**Tabel 2.1**  
**Komposisi Penempatan Aparatur Per Bagian Lingkup Sekretariat Daerah**

No	Unit Kerja	Jumlah				
		PNS	CPNS	Honda	PTT	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	Sekretaris Daerah	1	-	-	-	1
2	Staf Ahli Bupati	2	-	-	-	2
3	Asisten Bidang Pemerintahan	-	-	-	-	-
4	Asisten Bidang Pembangunan	1	-	-	-	1
5	Asisten Bidang Kemasyarakatan	1	-	-	-	1
6	Bagian Pemerintahan	6	-	-	2	8
7	Bagian Organisasi	6	-	-	2	8
8	Bagian Hukum	3	-	-	2	5
9	Bagian Ekonomi Pembangunan	4	-	1	-	5
10	Bagian P2BJ	3	-	-	-	3
11	Bagian Humas Dan Protokol	14	-	-	-	13
12	Bagian Kesejahteraan Rakyat	6	-	-	2	8
13	Bagian Umum	32	-	-	6	37
	<b>TOTAL</b>	<b>79</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>92</b>

Dari segi penempatan PNS pada jabatan tertentu di Sekretariat Daerah dianggap telah cukup sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki. Dengan demikian PNS di Sekretariat Daerah bisa dipandang telah memiliki kapasitas dan kompetensi yang cukup untuk mengemban tugas kedinasan, sehingga diharapkan berbagai program dan kegiatan yang telah direncanakan dan

dilaksanakan dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Terutama dalam upaya pencapaian Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Tahun 2013-2017 dan mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Barito Kuala.

Berikut tabel mengenai gambaran sumberdaya PNS di lingkup Sekretariat Daerah ;

**Tabel 2.2**  
**Komposisi PNS Lingkup Sekretariat Daerah**  
**Berdasarkan Jabatan dan Pendidikan**

NO	NAMA JABATAN	ESSELON	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	L/P	GOL RUANG	PENDIDIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SEKRETARIS DAERAH	II/a	Ir. SUPRIYONO , MIP 195901271985031009	MAGETAN, 27-01-1959	L	IV/d	S2
2	STAF AHLI BIDANG POLITIK DAN PEMERINTAHAN	II/b	Drs. NORMAN, M.AP 195810191985111001	BARITO KUALA, 19-10-1958	L	IV/c	S2
3	STAF AHLI BIDANG HUKUM DAN KEMASYARAKATAN	II/b	ISMED ZULFIKAR, SH 196404011992031017	KOTABARU, 01-04-1964	L	IV/b	S2
4	ASISTEN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	II/b	MUHAMMAD ANTHONY, S.Sos 196111071981011003	BANJARBARU, 07-11-1961	L	IV/c	S2
5	ASISTEN BIDANG KEMASYARAKATAN	II/b	Drs. AKHMAD MAWARNI, M.Pd 196406011984061001	HSS, 01-06-1964	L	IV/c	S2
6	KEPALA BAGIAN UMUM	III/a	NOOR ABIDIN, S.AP 196008291982031017	BANJARMASIN, 29-08-1960	L	IV/b	S1
7	KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN	III/a	MULIANSYAH, S.IP, M.Si 196602221986021003	BARITO KUALA, 22-02-1966	L	IV/b	S2
8	KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	III/a	SARBANDI, S.AP 196103051982011011	BARITO KUALA, 05-03-1961	L	IV/b	S2
9	KEPALA BAGIAN P2BJ	III/a	Drs. FATHUR ZAIN 196202131985031015	HST, 13-02-1962	L	IV/b	S1
10	KEPALA BAGIAN ORGANISASI	III/a	IBADURRAHMAN, S.Sos, M.IP 197207241999031004	BANJARMASIN, 24-07-1972	L	IV/b	S2
11	KEPALA BAGIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	III/a	THASNOOR SYAHBANA, M.Hut 197010101997031011	BANJARMASIN, 10-10-1970	L	IV/a	S2
12	KEPALA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	III/a	HERY SASMITA, S.STP, M.AP 198402202003121001	MARABAHAN, 20-02-1984	L	III/d	S2
13	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEUANGAN	IV/a	SAIFUDIN, S.AP 196507121985031006	PURWOREJO, 12-07-1965	L	III/d	S1
14	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN	IV/a	EKO PURNAMA SAKTI, S.STP, M.Si 198310242002121001	BARITO KUALA, 24-10-1983	L	III/d	S2
15	KEPALA SUB BAGIAN PERLENGKAPAN DAN RUMAH TANGGA	IV/a	NURWAHYUDI, S.IP, M.IP 198711262007011001	BARAMBAI, 26-11-1987	L	III/c	S2
16	KEPALA SUB BAGIAN BINA PEMERINTAHAN UMUM	IV/a	ARDIMANSYAH 196412091986021009	BARITO KUALA, 09-12-1964	L	III/d	SMA
17	KEPALA SUB BAGIAN PERTANAHAN DAN BATAS WILAYAH	IV/a	ABDI MAULANA, S.STP 198407312002121002	BARITO KUALA, 31-07-1984	L	III/d	S1

NO	NAMA JABATAN	ESSELON	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	L/P	GOL RUANG	PENDIDIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
18	KEPALA SUB BAGIAN BINA OTONOMI DAERAH	IV/a	ARIS SAPUTERA, S.STP, M.Si 198604052004121001	BANJARMASIN, 05-04-1986	L	III/c	S2
19	KEPALA SUB BAGIAN BINA KESEJAHTERAAN	IV/a	KHALID EFFENDI, S.Ag 197503072007011008	HSS, 01-08-1961	L	III/d	S1
20	KEPALA SUB BAGIAN BINA KERJASAMA KEAGAMAAN	IV/a	MUZAKIR, S.Sos 196310121983031012	BARITO KUALA, 12-10-1963	L	III/d	S1
21	KEPALA SUB BAGIAN BINA KEMASYARAKATAN	IV/a	HERNADI A, S.Sos 196108011986021004	BARITO KUALA, 07-03-1975	L	III/c	S1
22	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PENDATAAN	IV/a	AKHMAD TAJUDIN, ST, MT 196502121989031010	BANJARMASIN, 12-02-1965	L	IV/a	S2
23	KEPALA SUB BAGIAN PENGADAAN	IV/a	ZAHARI, SE 196409211990031006	BARITO UTARA, 21-09-1964	L	III/d	S1
24	KEPALA SUB BAGIAN PENYULUHAN DAN DOKUMENTASI HUKUM	IV/a	BILHAM, SH 196509012000031005	ALABIO, 01-09-1965	L	III/d	S1
25	KEPALA SUB BAGIAN AKUNTABILITAS KINERJA	IV/a	MUKTI WAHONO, S.STP 198402152004121001	MARABAHAN, 15-02-1984	L	III/c	DIV
26	KEPALA SUB BAGIAN KETATALAKSANAAN DAN INOVASI	IV/a	Dra. IDAWATI RAHMI 196802201993032007	BANJARMASIN, 20-02-1968	P	III/d	S1
27	KEPALA SUB BAGIAN BINA PEMBANGUNAN FISIK DAN PRASARANA	IV/a	A G MAJEDI, S.IP, MM 197002141990021002	HST, 14-02-1970	L	IV/a	S2
28	KEPALA SUB BAGIAN BINA PERTANIAN	IV/a	ADI NAUFAR, SPi 197008221998031010	BANJARMASIN, 22-08-1970	L	III/d	S1
29	KEPALA SUB BAGIAN BINA PEREKONOMIAN MASYARAKAT	IV/a	NIFTATUL HAIRIAH, S.AP, M.AP 197404181995032001	MARABAHAN, 18-04-1974	P	III/d	S2
30	KEPALA SUB BAGIAN PROTOKOL	IV/a	ARIEF WISUDA WARDANA, S.STP, MM 198610082006021002	LEPASAN, 08-10-1986	L	III/c	S2
31	KEPALA SUB BAGIAN PEMBERITAAN DAN DOKUMENTASI	IV/a	MUHAMMAD DIDIK KAHARUDIN, S.IP 198612022007011001	MARABAHAN, 02-12-1986	L	III/c	S1
32	OPERATOR SPEEDBOAT		BASUKI R 196204042006041005	BARITO KUALA, 04-04-1962	L	II/a	SMP
33	PENGADMINISTRASI PERSURATAN		HADERANSYAH 196206082007011011	MARABAHAN, 08-06-1962	L	II/c	SMA
34	PENGADMINISTRASI UMUM		NORSIAH 196305041985022001	BARITO KUALA, 04-05-1963	P	III/b	SMA
35	PRAMU BAKTI		KESUMA BUDI 196401261986031009	MARABAHAN, 26-01-1964	L	III/a	SMA/ PAKET C
36	PENGEMUDI		SATURAN 196605202006041009	BANTUIL, 20-05-1966	L	I/b	SD
37	PRAMU TAMAN		HAMSANI 196702252010011002	HST, 25-02-1967	L	I/d	SMP
38	TEKNISI SARANA DAN PRASARANA		AKHMAD SURYANI 196709302006041004	BARITO KUALA, 30-09-1967	L	II/c	SMA
39	PENGEMUDI		AHYAR 196711102007011034	BARITO KUALA, 10-11-1967	L	I/c	SD

NO	NAMA JABATAN	ESSELON	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	L/P	GOL RUANG	PENDIDIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
40	PENGEMUDI VIP		SALLY WANI YAHYA 196711112006041010	BANJARMASIN, 11-11-1967	L	II/a	SMP
41	ANALIS PEMBANGUNAN		JALIRAHMAN, SE 196801052007011025	BANJAR, 05-01-1968	L	II/c	S1
42	PENGEMUDI		SURIADI ARIWIBOWO 197102012006041014	BARITO KUALA, 01-02-1971	L	II/c	SMA/ PAKET C
43	PENGELOLA KEUANGAN		AHMADI, SE 197204262001121007	ACEH BESAR, 26-04-1972	L	III/b	S1
44	PENGELOLA PERJALANAN DINAS		SAUDAH NOOR 197306282007012018	MARABAHAN, 28-06-1973	P	II/c	SMA
45	PENGELOLA GAJI		EKA EMILIA, SE 197401051993032005	BANJARMASIN, 05-01-1974	P	III/c	S1
46	PENGADMINISTRASI UMUM		RUSMEGAWATI 197405042010012002	BARITO KUALA, 04-05-1974	P	I/b	SD
47	VERIFIKATOR KEUANGAN		HERI NURYANI, SE 197604102010012005	NGANJUK, 10-04-1976	P	III/b	S1
48	TEKNISI SARANA DAN PRASARANA		TARJI 197610102010011023	BARITO KUALA, 10-10-1976	L	II/b	SMA/ PAKET C
49	PENGADMINISTRASI DATA PENYAJIAN DAN PUBLIKASI		KHAIRUL ABDAL 197707022007012007	BARITO KUALA, 02-07-1977	P	II/c	SMA
50	PENGADMINISTRASI PERSURATAN		EVI 197802102007012013	BARITO KUALA, 10-02-1978	P	II/b	SMA/ PAKET C
51	AJUDAN		ABDURRAHMAN 197903132006041010	BARITO KUALA, 13-03-1979	L	II/a	SMA
52	AJUDAN		YAYAT HIDAYAT 197904212010011013	TASIKMALAYA, 21-04-1979	L	I/d	SMP
53	PENGEMUDI		HADRAN 197911192007011008	BARITO KUALA, 19-11-1979	L	I/d	SMP/ PAKET B
54	PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM		MUHAMAD NOOR, 198004022010011014	MARABAHAN, 02-04-1980	L	II/b	SMK
55	PRANATA ACARA		NOR AFNI, S.I.Kom 198105052007012017	BARITO KUALA, 05-05-1981	P	III/a	S1
56	PENGADMINISTRASI UMUM		LINA ASTUTI 198111052007012010	BARITO KUALA, 05-11-1981	P	II/c	SMA
57	PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA KANTOR		ALI MAZENI 198201252005011007	BARITO KUALA, 25-01-1982	L	II/b	SMP
58	ANALIS PRODUK HUKUM		FARIDAH, SH 198202042008032004	BARITO KUALA, 04-02-1982	P	III/c	S1
59	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN		HERLINA 198202262010012014	BARITO KUALA, 26-02-1982	P	II/b	SMA
60	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA		RIYANTO, SE 198204122005011010	BARITO KUALA, 12-04-1982	L	III/a	S1
61	BENDAHARA		MUHAMMAD WAHYUDI, SE 198209082006041013	KANDANGAN, 08-09-1982	L	III/a	S1
62	ANALIS KELEMBAGAAN		HASNA YASNIDA, S.Sos 198209242010012019	BANJARMASIN, 24-09-1982	P	III/b	S1
63	PENGELOLA KENDARAAN		SURYA FIRDAUS 198303312005011004	MARABAHAN, 31-03-1983	L	II/b	SMP
64	PRAMU BAKTI		MUHAMMAD MULYADI 198304252010011018	BARITO KUALA, 25-04-1983	L	I/b	SD/ PAKET A

NO	NAMA JABATAN	ESSELON	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	L/P	GOL RUANG	PENDIDIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
65	PENGADMINISTRASI OTONOMI DAERAH		SUPIAN NOOR 198305022008011013	MARABAHAN, 02-05-1983	L	II/c	SMK
66	PENGADMINISTRASI PERSURATAN		TATIK NOR AINA, A.Md 198312042009042007	BANJARMASIN, 04-12-1983	P	III/a	DIII
67	PENGELOLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		MUHAMAD ALIMIN 198401042014061003	TAPIN, 04-01-1984	L	II/a	SMA
68	PRANATA ACARA		WIDYA ASTUTY, S.Sos 198403212007012001	BARITO KUALA, 21-03-1984	P	III/a	S1
69	PENGELOLA DATA		RONI FASLAH, S.I.Kom 198404042007011002	BARITO KUALA, 04-04-1984	L	II/c	S1
70	PRANATA KOMPUTER		DWI YANNUR SETIAWAN, A.Md 198409292010011019	BANJARMASIN, 29-09-1984	L	II/d	DIII
71	BENDAHARA		DWI AMELIASARI, SE 198411032010012019	BARITO KUALA, 03-11-1984	P	III/a	S1
72	PENGADMINISTRASI BATAS WILAYAH		YUSNADI ISWANDI 198608082010011011	MARABAHAN, 08-08-1986	L	II/b	SMA
73	PENGADMINISTRASI ANALIS DAN KEMITRAAN MEDIA		NORLINA, S.AB 198805072009042001	SAMPIT, 07-05-1988	P	III/a	S1
74	AJUDAN		AULIA ROSYADI, S.STP 199105202012061002	MARABAHAN, 20-05-1991	L	III/b	DIV
75	ANALIS BINA KEHIDUPAN AGAMA		M. SABIRIN, S.Hi 199205072015031001	BANJARMASIN, 07-05-1992	L	III/a	S1
76	AJUDAN		REZA RAMADHANI PUTRA, S.STP 199303032015071001	BARITOKUALA, 03-03-1993	L	III/a	DIV
77	PETUGAS PROTOKOL		ZULMEI ADHA, S.STP 19940519 201609 1 001				DIV
78	TENAGA PELIPUTAN		OKTOPIANOR KELANA, S.STP 19941022 201609 1 001				DIV
79	TENAGA PELIPUTAN		BERAHIM 19781020 201001 1 003				SMA

## 2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

### 2.3.1 Capaian Kinerja Utama Tahun 2013-2017

Kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan Sekretariat Daerah khususnya tahun 2012-2017 berdasarkan dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah tertuang dalam Keputusan Sekretaris Daerah No. 188.4/1894/SETDA/2016 Tentang Reviu Rencana Strategis Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012-2017. telah ditetapkan garis-garis besar visi, misi, tujuan, sasaran beserta indicator-indikator terukur bagi arah pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah tahun 2013-2017, pengganti Keputusan Sekretaris Daerah No.

180/1240/SETDA/2013 Tentang Rencana Strategis Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2013-2017. Dengan indicator kinerja utama (IKU) berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah No. 188.45/1830/SETDA/2017 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 188.45/1895/Setda/2016 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Secara umum, Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala telah dapat melaksanakan tugas, dengan gambaran pencapaian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah  
Kabupaten Barito Kuala

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke					
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
Status LKPJ	-	-	-	DT	DT	DT	DT	DT	DT	DT	DT	DT	DT	DT	1	1	1	1	1
Nilai LPPD	-	-	-	2.7	2.9	3	3.15	3.25	2.79	3.15	3.02	3.15	3.22	1.03	1.11	1.01	1	0.99	
Nilai Evaluasi LKIP Kabupaten	-	-	-	6.7	7	7.5	8	8.5	6.78	7.48	6.48	8.12	8.12	1.01	1.07	0.86	1.02	0.96	
Nilai SAKIP Kabupaten	-	-	-	C	CC	CC	B	B	C	C	CC	CC	B	1	0.7	1	0.75	1	
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten	-	-	-	77	79	81	83	85	63.4	71.1	71.4	85.5	82	0.82	0.9	0.88	1.03	0.96	

Marabahan, Juni 2018  
Sekretaris Daerah

Ir. Supriyono  
NIP. 19590127 198503 1 009

**Tabel 2.3.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017,**  
**Dibanding Dengan Target Akhir Renstra Tahun 2013-2017**

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja Utama	Satuan	Realisasi Capaian Tahun 2017			Target Hingga Tahun 2017	
				Target	realisasi	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>A</b>	<b>MISI KE-1 : Meningkatkan kapasitas kelembagaan Sekretariat Daerah</b>							
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah (angka)	Kategori	B	B	100	B	100
<b>B</b>	<b>MISI KE-3 : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi paradigma reformasi birokrasi</b>							
2	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah	Status LKPJ (status)	Status	diterima	diterima	100	500	100
		Nilai LPPD	Nilai	3,25	3,264	100,4	3,25	100,4
		Nilai Evaluasi LKIP Kabupaten	Nilai	8,5	8,12	95,52	8,5	95,52
		Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	B	CC	91,36	B	91,36
3	Terwujudnya tertib pelayanan pemerintahan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten	%	85	82	96,5	85	96,5
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b>						<b>98</b>	<b>Memuaskan</b>	

Secara keseluruhan untuk capaian rata-rata Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Tahun 2017 yang terdiri dari 3 (tiga) sasaran, dengan 6 (enam) Indikator Sasaran Kinerja Utama Sekretariat Daerah sebesar 98% dengan predikat memuaskan.

Dari ke 6 indikator kinerja utama Sekretariat Daerah 2 (dua) indicator yang memperoleh capaian 100%, yakni nilai SAKIP Sekretariat Daerah dan Status LKPj, Nilai LPPD memperoleh capaian 99%. Sedangkan 3 (tiga) indicator lainnya meski tidak mencapai 100%, dari segi pencapaian masih dianggap memuaskan dimana terjadi kenaikan dalam perolehan nilai setiap item indicator kinerja.

Untuk capaian kinerja yang masih rendah yakni Nilai SAKIP Kabupaten dari target Nilai B (skor 60-69), memperoleh Nilai CC (skor 55,73) meski demikian dari segi capaian perolehan skor nilai telah terjadi kenaikan sebesar 5,71 point dari

nilai 50,02 di tahun 2016 menjadi 55,73 pada tahun 2017.

**Tabel 2.4**  
**Akumulasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah**  
**Tahun 2013-2017**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Indikator Kinerja (%)	Interprestasi	Tingkat Pencapaian
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>Misi 3 : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pradigma reformasi birokrasi</b>			
1.	Nilai LPPD	100,4	Memuaskan	<b>Belum Mencapai Target (100%)</b>
2.	Nilai Evaluasi LKIP Kabupaten	95,5	Memuaskan	<b>Belum Mencapai Target (100%)</b>
3.	Nilai SAKIP Kabupaten	93	Memuaskan	<b>Belum Mencapai Target (100%)</b>
4.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten	96,5	Memuaskan	<b>Belum Mencapai Target (100%)</b>

Adapun gambaran capaian sasaran dengan masing-masing indikator kinerja utama pada tahun 2017 sebagai berikut :

#### 1) Analisis Pencapaian Nilai LPPD Kabupaten

Untuk melihat capaian indikator kinerja Utama Nilai LPPD Pemerintah Daerah terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.5**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Nilai Laporan Penyelenggaraan**  
**Pemerintah Daerah Tahun 2017**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		
			Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1.	Nilai LPPD	Nilai	3,25	3,264*	100,4
<b>CAPAIAN KINERJA</b>					<b>100,4</b>
<b>INTERPRESTASI</b>					<b>MEMUASKAN</b>

Sumber : Bagian Pemerintahan

Tabel di atas memperlihatkan bahwa capaian kinerja indikator utama Nilai

LPPD Kabupaten Tahun 2017 sebesar 100,4 % dengan predikat memuaskan. Pelaksanaan indikator kinerja secara teknis ditunjang oleh pelaksanaan program perencanaan pembangunan daerah dengan indikator kinerja eselon III yakni Sinkronisasi perencanaan dan kinerja pembangunan daerah, pada tataran eselon IV ditindak lanjuti melalui kegiatan koordinasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan indikator Jumlah laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD).

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah setiap tahun dan setiap akhir masa jabatan Kepala Daerah yang berfungsi sebagai wahana sinergitas dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah dan Pemerintah dalam kerangka mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah guna menunjang terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Nilai LPPD diukur dari skor evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pada tahun 2017 telah disampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 ke Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Pembangunan Daerah (Bangda). Dari hasil penyampaian tersebut Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Pembangunan Daerah belum melaksanakan penilaian dan penyampaian hasil laporan. Terakhir hasil penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri pada Tahun 2017, namun atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan tahun 2015 bagi seluruh Provinsi, Kabupaten dan Kota. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 120-10421 Tahun 2016 tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2015, tanggal 30 Desember 2016. Dimana nilai peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Barito Kuala tahun 2015 berada pada urutan 136 dengan nilai sebesar 3,0147 dengan kategori 'Sangat Tinggi'.

Pada tahun 2016 untuk Penilaian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diperoleh angka sementara dari Tim Kementrian Dalam Negeri untuk Kabupaten Barito Kuala mendapat nilai 3,2169 dengan Predikat Sangat Tinggi, dari hasil

penilaian ini maka Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kab. Barito Kuala Tahun 2017 hampir mencapai target akhir sebesar 99%. Capaian tersebut naik 0.2022 point atau 6,29% dibandingkan capaian tahun 2015 dengan nilai LPPD sebesar 3,0147.

Adapun capaian Nilai Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Kabupaten Barito Kuala tahun 2013-2017, sebagai berikut :

**Tabel 2.6**  
**Capaian Indikator Kinerja Nilai Laporan Penyelenggaraan**  
**Pemerintah Daerah Tahun 2013 s.d. 2017**

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian					Ket
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8
Nilai LPPD	Nilai	2,7939.	3,1547	3,0147	3,26	3,2169*	Penilaian tahun 2017, merupakan angka capaian 2016

Sumber : Bagian Pemerintahan

Mencermati tabel realisasi capaian nilai LPPD di atas dari tahun ketahun cenderung mengalami fluktuasi naik dan turun, namun demikian dengan adanya trend kenaikan nilai LPPD tahun 2014 yang hingga 1 point, dan komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan di daerah dengan menerapkan seluruh kewenangan yang telah dilimpahkan maka kondisi positif ini diharapkan akan meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun 2016 dan 2017.

Dalam upaya optimalisasi peningkatan nilai LPPD, Sekretariat Daerah terus melakukan koordinasi antar instansi terkait guna pemenuhan kewajiban dan bukti dukung dari isian data LPPD Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang akan diserahkan dan diperiksa secara objektif oleh Tim dari Departemen Dalam Negeri.

## 2) Analisis pencapaian Nilai LKIP Kabupaten

Untuk melihat capaian indikator kinerja Utama Nilai LAKIP Kabupaten terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.7**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Nilai Evaluasi LKIP Kabupaten**  
**Tahun 2017**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		
			Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1.	Nilai Evaluasi LKIP Kabupaten	Nilai	8,5	8,12*	95,5
<b>CAPAIAN KINERJA</b>					<b>95,5</b>
<b>INTERPRESTASI</b>					<b>MEMUASKAN</b>

*Sumber : Bagian Organisasi*

Tabel di atas memperlihatkan bahwa capaian kinerja indikator utama nilai evaluasi LKIP Kabupaten Tahun 2017 (akhir RENSTRA) sebesar 95,5% dengan predikat memuaskan. Pelaksanaan indikator kinerja secara teknis ditunjang oleh pelaksanaan program perencanaan pembangunan daerah dengan indikator kinerja eselon III yakni Sinkronisasi perencanaan dan kinerja pembangunan daerah, pada tataran eselon IV ditindak lanjuti melalui kegiatan koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah, dengan indikator jumlah dokumen LAKIP kabupaten.

Hingga akhir tahun 2017 nilai evaluasi LKIP Kabupaten kategori laporan terhadap laporan kinerja instansi pemerintah daerah tahun 2017, belum tersedia, sehingga untuk dasar data penilaian sementara menggunakan nilai LAKIP kategori laporan tahun 2016 yang lalu, dimana capaian kinerja nilai pelaporan SAKIP sebesar 8,12 dari target 8,5 point atau persentase capaiannya sebesar 95,5%, dan apabila capaian tahun 2016 tersebut dibandingkan dengan target 2017 sebagai tahun terakhir RENSTRA, maka capaiannya sudah mencapai 95,5%.

Dalam hal peningkatan kualitas SAKIP Kabupaten terutama dalam komponen pelaporan sejak tahun 2016 telah dilaksanakannya Reviu terhadap Dokumen Indikator Kinerja Pemerintah Daerah, yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati nomor 38 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Perbup Nomor 68 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2015 Tentang Review Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) RPJMD Tahun 2013-2017, tanggal 13 oktober 2016. Kemudian pada Tahun 2017 kembali dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan Dokumen Indikator Kinerja Kabupaten dengan konsultasi lebih intensif ke Inspektorat Propinsi Kalimantan Selatan.

Dengan demikian diharapkan sistematis dan kualitas data dan informasi yang disajikan dalam dokumen pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2017 dapat lebih terarah, dengan mengacu pada perbaikan indikator sasaran dan target yang lebih jelas, realistis dan terukur.

Adapun komposisi hasil penilaian pada komponen penilaian SAKIP Pemerintah Daerah Kab. Barito Kuala Tahun 2017, sebagai berikut.

**Tabel 2.8**  
**Rekapitulasi Capaian indikator Kinerja Utama Nilai Evaluasi LKIP Kabupaten Tahun 2014-2017**

Komponen yang dinilai		Bobot	Nilai 2014	Nilai 2015	Nilai 2016	Nilai 2017
1		2	3	4	5	6
1.	Pelaporan kinerja (LKIP)	15	7,48	6,48	8,12	8,12*
<b>Hasil Evaluasi</b>		<b>100</b>	<b>50</b>	<b>43,2</b>	<b>54</b>	<b>54*</b>

Sumber : Bagian Organisasi

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa secara kualitas dokumen Laporan Akuntabilitas Kabupaten Barito Kuala sebagai salah satu komponen dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Barito Kuala setiap tahunnya selalu meningkat.

### 3) Analisis pencapaian Nilai SAKIP Pemerintah Daerah

Adapun hasil capaian Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Barito Kuala tahun 2016 yang dinilai pada tahun 2017, sebagai berikut.

**Tabel 2.9**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Tahun 2017**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		
			Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1.	Nilai SAKIP Kab	Nilai	B	CC	93
			>60-70	55,73*	93
<b>CAPAIAN KINERJA</b>					<b>91,36</b>
<b>INTERPRESTASI</b>					<b>MEMUASKAN</b>

Sumber : Bagian Organisasi

Hasil evaluasi SAKIP tahun 2016 -yang dilaksanakan pada tahun 2017-

menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala berada pada tingkat CC dengan nilai 55,73, posisi ini lebih rendah dibanding dengan target yang mengharapkan berada di tingkat B yang memiliki nilai > 60 – 70. Namun demikian mengalami peningkatan yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan hasil evaluasi tahun 2015 –yang dilaksanakan pada tahun 2016- yang sama berada di tingkat CC dengan nilai 50,02.

Peningkatan nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2016 sejalan dengan upaya-upaya perbaikan akuntabilitas kinerja baik dari sisi personal dan material.

Dari sisi personal, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala berupaya meningkatkan komitmen semua aparatur terutama kepada Kepala SKPD untuk selalu menumbuhkan dan mengembangkan budaya kinerja pada setiap aktivitas kedinasan. Dalam setiap kegiatan baik dalam rapat koordinasi maupun diklat/bintek pimpinan daerah selalu menyampaikan dan mengingatkan pentingnya menumbuhkan dan mengembangkan budaya kinerja. Upaya lain adalah dengan meningkatkan kemampuan dan kompetensi aparatur pengelola akuntabilitas kinerja pada semua jajaran SKPD melalui kegiatan diklat, bintek maupun workshop akuntabilitas kinerja baik di dalam daerah maupun di luar daerah.

Dari sisi material, upaya yang dilakukan adalah memperbaiki kualitas indikator-indikator dalam materi RPJMD dan Renstra SKPD, serta indikator kinerja, indikator program dan indikator kegiatan agar sesuai dengan prinsip SMART. Upaya lain dengan melakukan sinkronisasi indikator-indikator pada materi komponen akuntabilitas kinerja yang meliputi perencanaan, pengukuran kinerja, sampai dengan pelaporan kinerja.

Namun demikian, ada beberapa permasalahan dan kelemahan dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang harus mendapat perbaikan, yaitu *pertama*, perencanaan kinerja belum sepenuhnya menyajikan indikator kinerja tujuan beserta targetnya, *kedua*, indikator kinerja yang dipilih belum sepenuhnya relevan dengan kinerja utama yang diukur, *ketiga*, mekanisme pengelolaan data kinerja yang ada belum menjamin keandalan *database* kinerja, *keempat*, evaluasi belum menilai tingkat keberhasilan program dan merekomendasikan upaya perbaikan kinerja, dan *kelima* capaian kinerja *outcome* belum terkonfirmasi secara memadai.

Adapun komposisi hasil penilaian pada komponen penilaian SAKIP

Pemerintah Daerah Kab. Barito Kuala sejak Tahun 2014-2016, sebagai berikut.

**Tabel 2.10**  
**Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Utama Nilai SAKIP Kabupaten**  
**Tahun 2014-2016 per Komponen Penilaian**

Komponen yang dinilai		Bobot	Nilai 2014	Nilai 2015	Nilai 2016
1		2	3	4	5
a.	Perencanaan Kinerja	30	17,65	18,02	18,78
b.	Pengukuran Kinerja	25	6,65	9,82	15,7
c.	Pelaporan kinerja	15	7,48	6,48	8,12
d.	Evaluasi Internal	10	5,10	6,03	4,01
e.	Capaian Kinerja	20	9,21	9,57	9,12
<b>Hasil Evaluasi</b>		100	46,09	50,02	55,73
<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>			C	CC	CC

Dari tabel di atas memperlihatkan bahwa nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Barito Kuala selama 3 (tiga) tahun mengalami peningkatan dari tingkat C dengan nilai 46,09 pada tahun 2014 (dinilai pada tahun 2015) dan meningkat menjadi CC dengan nilai 50,02 pada tahun 2015 (dinilai pada tahun 2016), kemudian nilainya meningkat menjadi 55,73 pada tahun 2016 (dinilai pada tahun 2017), namun masih berada dalam kategori CC. Nilai dan kategori ini masih belum mencapai target 2016 (dinilai pada tahun 2017) yang mana target yang ingin diraih adalah kategori B dengan rentang nilai antara 60-70. Capaian tahun 2016 ini masih relatif jauh dibandingkan dengan target tahun 2017 sebagai tahun terakhir RPJMD yang mengharapkan berada di tingkat BB yang berada di nilai > 70 – 80.

#### 4) Analisis pencapaian Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Pemerintah Kabupaten

Capaian sasaran kinerja terwujudnya tertib pelayanan pemerintahan beserta indikator kinerja sarannya, terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.11**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)**  
**Pemerintah Kabupaten Tahun 2017**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		
			Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1.	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Pemerintah Kabupaten	%	85	82	96,5
<b>CAPAIAN KINERJA</b>					<b>96,5</b>

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		
			Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
	<b>INTERPRESTASI</b>				<b>MEMUASKAN</b>

Sumber : Bagian Organisasi

Tabel di atas memperlihatkan bahwa rata-rata capaian kinerja utama Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) sebesar 82 atau **96,5 %**, dari target kinerja tahun 2017 sebesar 85, sebagai tahun terakhir RENSTRA. Pelaksanaan indikator kinerja secara teknis ditunjang oleh pelaksanaan program peningkatan pelayanan publik dengan indikator kinerja eselon III yakni Persentase SPKD Pelayanan yang memiliki nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di atas 80, pada tataran eselon IV ditindak lanjuti dengan 3 (tiga) kegiatan terpilih meliputi : pelaksanaan survei indeks kepuasan masyarakat, monitoring dan evaluasi perizinan dan kompetisi unit pelayanan publik.

Kegiatan kompetisi unit pelayanan publik, indikator Jumlah SKPD/instansi yang mengikuti kompetisi unit pelayanan publik (Tk. Kecamatan & puskesmas). sebanyak 36 SKPD. Namun demikian untuk menunjang pencapaian indikator kinerja sasaran ini Sekretariat Daerah melalui bagian Pemerintahan juga melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan program PATEN di kecamatan sampel sebanyak 7 kecamatan.

**Tabel 2.12**  
**Capaian Indikator Kinerja Esselon III dan IV**  
**Mendukung Pencapaian Nilai IKM Tahun 2017**

No.	IK Esselon III	Capaian		IK Esselon IV	Capaian	
		Target	Realisasi		Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Persentase SPKD Pelayanan yang memiliki nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di atas 80	80 %	58%	Jumlah SKPD yang menyusun IKM	45	100%
Jumlah kecamatan yang dimonitoring dan dievaluasi terkait tingkat pelaksanaan perizinan				17	100%	

No.	IK Esselon III	Capaian		IK Esselon IV	Capaian	
		Target	Realisasi		Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
				Jumlah SKPD/instansi yang mengikuti kompetisi unit pelayanan publik dan inovasi (Tk. Kecamatan & puskesmas)	69	100%
<b>RATA-RATA CAPAIAN</b>					<b>100%</b>	
<b>INTERPRESTASI</b>					<b>MEMUASKAN</b>	

Sumber : Bagian Organisasi

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan kinerja eselon 3 dalam mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Sekretariat Daerah hanya sebesar 57,8 %, yakni dari 45 unit kerja yang melaksanakan survey IKM hanya 26 unit kerja saja yang mendapat nilai IKM melebihi 80, hal ini menurun jika dibandingkan tahun 2016 dimana dari 46 unit kerja yang melaksanakan survey IKM ada 38 unit kerja atau 82%, unit kerja yang mendapat nilai IKM di atas 80. Sedangkan untuk pelaksanaan kinerja eselon IV dalam mendukung pencapaian indikator kinerja eselon 3, sebagai berikut ;

**Indikator kinerja kesatu** perhitungan atas capaian kinerja indikator Jumlah SKPD/instansi yang mengikuti kompetisi unit pelayanan publik dan inovasi (Tk. Kecamatan & puskesmas) dengan target 69 unit kerja. Pelaksanaan penilaian SKPD pelaksana pelayanan public dan inovasi pelayanan dilaksanakan dalam rangka membina dan peningkatan kualitas pelayanan SKPD/unit kerja, dengan adanya penilaian ini SKPD/ Unit kerja diharapkan akan termotivasi untuk makin meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pelayanannya, sehingga pada akhirnya akan berdampak pada meningkatnya nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada SKPD/unit kerja bersangkutan.

Kegiatan penilaian dilaksanakan oleh Tim Penilai Kabupaten, yang ditetapkan oleh Bupati Barito Kuala berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/282/KUM/2017 Tanggal 7 Juli 2017 tentang Penilaian Kompetisi Unit Pelayanan Publik. Bersamaan dengan penilaian kualitas pelayanan

publik dilaksanakan pula penilaian terhadap unit kerja yang sama. Penilaian dikhususkan pada unit kerja kecamatan, kelurahan dan puskesmas.

Adapun hasil dari evaluasi penilaian pelayanan publik dan hasil penilaian inovasi pelayanan unit kerja kecamatan, kelurahan dan puskesmas, sebagai berikut ;

**Tabel 2.13**  
**Rekapitulasi Hasil Evaluasi Penilaian Publik dan Inovasi Pelayanan Tahun 2017**

No	Unit Pelayanan	Penilaian Pelayanan Publik	Penilaian Inovasi Pelayanan
1	2	3	4
1	Kecamatan Tabunganen	68,5	70
2	Kecamatan Mekarsari	68,92	68
3	Kecamatan Tamban	68,96	68
4	Kecamatan Anjir Pasar	68,97	68
5	Kecamatan Anjir Muara	71,5	70
6	Kecamatan Alalak	73,25	74
7	Kecamatan Mandastana	68,13	70
8	Kecamatan Jejangkit	68,94	70
9	Kecamatan Rantau Badauh	69,5	69
10	Kecamatan Cerbon	69,38	69
11	Kecamatan Bakumpai	72	90
12	Kecamatan Belawang	70,75	75
13	Kecamatan Wanaraya	69	68
14	Kecamatan Barambai	70,5	67
15	Kecamatan Marabahan	71,38	68
16	Kecamatan Tabukan	68	69
17	Kecamatan Kuripan	69,75	69
18	Kelurahan Marabahan Kota	69,38	69
19	Kelurahan Ulu Benteng	69,25	69
20	Kelurahan Lepas	69	69
21	Kelurahan Handil Bakti	68,9	69
22	Kelurahan Berangas	69,63	69
23	Kelurahan Berangas Barat	72,63	69
24	Puskesmas Belawang	88,75	95
25	Puskesmas Anjir Muara	84,38	90
26	Puskesmas Marabahan	86,88	90
27	Puskesmas Rantau Badauh	80	90
28	Puskesmas Mekarsari	76,25	70
29	Puskesmas Tamban	80	70
30	Puskesmas Anjir Pasar	76,25	70
31	Puskesmas Berangas	80	70
32	Puskesmas Mandastana	78,75	80
33	Puskesmas Jejangkit	75	70
34	Puskesmas Bantuil	71,25	70

No	Unit Pelayanan	Penilaian Pelayanan Publik	Penilaian Inovasi Pelayanan
1	2	3	4
35	Puskesmas Lepas	76,25	90
36	Puskesmas Tabunganen	72,5	70
37	Puskesmas Wanaraya	76,25	70
38	Puskesmas Barambai	76,25	70
39	Puskesmas Tabukan	84,38	80
40	Puskesmas Kuripan	76,25	70
41	Puskesmas Jelapat	75	70
42	Puskesmas Semangat Dalam	82,5	80
<b>Jumlah</b>		<b>3103,11</b>	<b>3081</b>
<b>Rata-rata capaian</b>		<b>73,88</b>	<b>73,36</b>

Sumber : Bagian. Organisasi.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut ;

- 1) Pada tahun 2017 ada 8 unit pelayanan yang mendapat kualifikasi hasil nilai  $\geq$  80, atau sekitar 19% dari jumlah 42 unit kerja yang dinilai. Dengan rata-rata capaian kualitas pelayanan publik sebesar 73,88 dan penilaian inovasi pelayanan 73,36.
- 2) Penilaian tertinggi didapat oleh Puskesmas Belawang dengan nilai 88,75, dan terendah didapat Kecamatan Tabukan dengan nilai 68.
- 3) Penilaian tingkat Kecamatan, kecamatan yang mendapat nilai pelayanan publik terbaik adalah Kecamatan Alalak dengan nilai 73,25 dan terendah didapat Kecamatan Tabukan dengan nilai 68.
- 4) Penilaian tingkat Puskesmas, Puskesmas yang mendapat nilai pelayanan publik terbaik adalah Puskesmas Belawang dengan nilai 88,75, dan terendah didapat Puskesmas Bantuil dengan nilai 71,25,.
- 5) Penilaian tingkat Kelurahan, Kelurahan yang mendapat nilai pelayanan publik terbaik adalah Kelurahan Berangas Barat dengan nilai 72,63, dan terendah didapat Kelurahan Handil Bakti dengan nilai 68,9.

Dalam hal upaya peningkatan kualitas perizinan di Kabupaten Barito Kuala, maka pada Tahun 2017 telah diterbitkan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala. Dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati ini dimungkinkan akan makin mempermudah dan mempercepat proses perizinan yang selama ini ada.

**Indikator kinerja kedua.** Dalam rangka mencapai indikator kinerja Jumlah kecamatan yang dimonitoring dan dievaluasi terkait tingkat pelaksanaan perijinan sebanyak 17 kecamatan, maka dilaksanakan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi perizinan. Kegiatan dilaksanakan pada triwulan III, sebagai dasar pelaksanaan kegiatan monitoring adalah Surat Tugas Sekretaris Daerah Nomor 094/508/Pem-SETDA, tanggal 20 Oktober 2017 keperluan melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi perijinan tahun 2017, pada Kec. Marabahan, Kec. Cerbon, Kec. Kuripan, Kec. Tabukan, Kec. Bakumpai, Kec. Rantau Badauh, Kec. Barambai, Kec. Wanaraya, Kec. Jejangkit, Kec. Mandastana, Kec. Belawang, Kec. Anjir Muara, Kec. Anjir Pasar, Kec. Tamban, Kec. Mekarsari, Kec. Tabunganen dari tanggal 23 Oktober s.d 16 November 2017.

Adapun beberapa hal terkait hasil dari monitoring dan evaluasi perijinan yang telah dilaksanakan, antara lain ;

- 1) Kecamatan dalam hal pemberian layanan perizinan di dasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat.
- 2) Terlaksananya kewenangan camat melalui pengawasan/pengendalian ketertiban umum, pemberian izin dan rekomendasi IMB perumahan non komersil, dan lain-lain sesuai kewenangan yang dilimpahkan.
- 3) Masih kurangnya koordinasi antar SOPD kecamatan terkait kewenangan Bupati dengan Dinas Teknis atau instansi lainnya, sehingga pelaksanaan pelayanan menjadi tidak optimal
- 4) Kondisi wilayah kerja yang berbeda dengan kecamatan lain, dilihat dari keadaan geografis dan keadaan penduduk, sebagian besar adalah lahan sawah atau pertanian, pemukiman dan industri dengan kepadatan penduduk yang berbeda-beda, sedangkan dari segi kewenangan Kecamatan mempunyai kesenangan yang relative sama dengan kecamatan yang lain.

**Indikator kinerja ketiga,** Kegiatan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berdasarkan Keputusan Menteri PAN Nomor 25 Tahun 2004 yang terakhir dirubah menjadi Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, baik pelaksana survei, indikator yang digunakan dan metodologi yang diterapkan. Survey ini bertujuan untuk menilai tingkat kepuasan

masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan. Ada 9 (sembilan) unsur penialaian, yaitu prosedur pelayanan, persyaratan, waktu pelayanan, biaya pelayanan, produk spesifikasi pelayanan, kompetensi pelaksana, prilaku pelaksana, maklumat pelayanan, dan penanganan pengaduan.

Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2017 pada SKPD/unit kerja lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan, yaitu pada bulan September sampai dengan bulan Oktober 2017, melalui surat Sekretaris Daerah Nomor 065/1562/ORG-SETDA, tanggal 28 Agustus 2017, perihal Pelaksanaan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2017. Unit Penyelenggara Pelayanan yang melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat adalah Satuan/Unit Kerja yang tugas dan fungsinya memberikan langsung pelayanan kepada masyarakat. Ada 45 unit pelayanan yang wajib melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, RSUD H. Abdul Aziz Marabahan, 17 Kecamatan, 6 Kelurahan, dan 19 Puskesmas.

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan secara mandiri dan langsung oleh masing-masing unit penyelenggara pelayanan, mulai dari penyebaran kuisisioner, penghitungan kuisisioner dan penyusunan laporan hasil survey. Pemerintah Kabupaten Barito Kuala melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah melakukan pembinaan, pemantauan dan pengendalian terhadap kegiatan survei dengan mewajibkan semua unit penyelenggara pelayanan menyampaikan laporan hasil survey kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk dijadikan bahan evaluasi capaian kinerja pelayanan pada masing-masing unit penyelenggara pelayanan.

Dari kegiatan tahun 2017 memperlihatkan bahwa dari target 45 satuan/unit kerja, seluruhnya telah melaksanakan survey dan menyampaikan laporannya atau tercapai 100 %, dengan capaian rata-rata indeks sebesar 82 kategori “memuaskan”. Indeks tertinggi sebesar 94,59 diperoleh Puskesmas Tamban dan indeks terendah sebesar 69,53 diperoleh Puskesmas Rantau Badauh, sedangkan satuan/unit pelayanan yang capaian indeksnya di atas 80 berkategori baik berjumlah 26 satuan/unit dari target 36 Unit kerj atau tercapai 58 %.

**Tabel 2.14**  
**Rekapitulasi Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat**  
**Tahun 2013 s.d. 2017**

No	Unit Pelayanan	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1	Dinas Dukpencapil	0	0	0	70,00	78,27
2	Dinas Perhubungan, Kominfo	80,8	80,6	80,6	80,28	-
3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	80,2	80,8	81,1	91,33	78,00
4	RSUD H. Abdul Aziz	76,3	78,0	80,0	91,41	91,41
5	Kecamatan Tabunganen	0	81,1	0	85,78	77,15
6	Kecamatan Mekarsari	79,8	79,3	69,3	69,30	77,25
7	Kecamatan Tamban	76,6	81,0	81,0	82,00	83,00
8	Kecamatan Anjir Pasar	78,3	78,8	79,0	78,00	81,00
9	Kecamatan Anjir Muara	79,9	80,0	81,0	87,04	91,00
10	Kecamatan Alalak	81,0	82,5	83,0	86,78	85,03
11	Kecamatan Mandastana	0	75,0	0	94,00	94,00
12	Kecamatan Jejangkit	75,8	69,8	69,8	83,48	79,75
13	Kecamatan Rantau Badauh	0	83,3	82,8	82,24	82,25
14	Kecamatan Cerbon	0	78,9	0	78,00	80,75
15	Kecamatan Bakumpai	77,0	0	76,6	90,96	79,14
16	Kecamatan Belawang	80,3	80,0	80,3	88,89	88,46
17	Kecamatan Wanaraya	82,4	82,5	83,4	83,35	88,46
18	Kecamatan Barambai	89,0	90,5	90,8	72,00	81,50
19	Kecamatan	77,0	80,3	82,2	82,21	81,25

No	Unit Pelayanan	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
	Marabahan					
20	Kecamatan Tabukan	0	76,2	0	76,20	80,50
21	Kecamatan Kuripan	0	0	78,9	81,19	83,19
22	Kelurahan Marabahan Kota	76,2	76,3	77,0	97,00	78,50
23	Kelurahan Ulu Benteng	77,0	79,5	80,5	95,00	75,72
24	Kelurahan Lepas	73,8	0	73,8	95,92	78,51
25	Kelurahan Handil Bakti	73,8	76,0	78,3	83,00	83,00
26	Kelurahan Berangas	81,3	74,3	76,0	82,00	75,72
27	Kelurahan Berangas Barat	76,5	78,5	79,0	83,00	83,00
28	Puskesmas Tabunganen	79,0	89,2	80,4	98,74	77,05
29	Puskesmas Mekarsari	81,8	78,3	78,5	95,85	81,75
30	Puskesmas Tamban	86,0	84,8	84,3	99,56	94,59
31	Puskesmas Anjir Pasar	78,8	80,3	83,3	98,37	81,05
32	Puskesmas Anjir Muara	73,4	75,0	76,4	76,40	78,07
33	Puskesmas Berangas	81,3	81,5	83,6	85,48	85,59
34	Puskesmas Mandastana	77,2	78,5	86,7	99,04	76,82
35	Puskesmas Jejangkit	77,9	79,5	79,9	99,19	79,56
36	Puskesmas Rantau Badauh	77,9	76,7	73,8	96,67	69,53
37	Puskesmas Bantuil	80,0	81,3	84,0	91,70	80,46
38	Puskesmas Lepas	79,1	80,1	79,9	99,19	78,16
39	Puskesmas Belawang	78,0	80,5	80,8	88,00	81,00
40	Puskesmas Wanaraya	0	0	83,4	99,56	80,44
41	Puskesmas Barambai	77,8	79,6	78,4	79,17	84,73

No	Unit Pelayanan	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
42	Puskesmas Marabahan	81,3	81,2	81,5	98,74	79,10
43	Puskesmas Tabukan	78,0	82,1	83,1	96,96	84,54
44	Puskesmas Kuripan	76,5	77,8	83,5	88,00	81,28
45	Puskesmas Jelapat	0	78,3	79,0	92,44	79,11
46	Puskesmas Semangat Dalam	77,3	80,8	79,5	80,75	78,60
<b>Jumlah</b>		<b>2.914,3</b>	<b>3.268,7</b>	<b>3.284,3</b>	<b>3.934,4</b>	3.668,4
<b>Rata-rata</b>		<b>63,4</b>	<b>71,1</b>	<b>71,4</b>	<b>85,5</b>	82
<b>Target Indikator Utama</b>		<b>65</b>	<b>70</b>	<b>75</b>	<b>80</b>	<b>85</b>

Sumber : Bagian. Organisasi.

Dari tabel di atas dapat dilihat capaian indeks kepuasan masyarakat pada masing-masing unit pelayanan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016. Secara umum terjadi kenaikan konsisten indeks pada sebagian besar unit pelayanan, namun demikian pada tahun 2017 nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten mengalami penurunan sebesar 3,5 point menjadi 82 (Memuaskan).

Kemudian dari sisi kinerja pelaksanaan survey juga memperlihatkan hasil yang menurun pada tahun 2017 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.15**  
**Capaian Kinerja Survey Indeks Kepuasan Masyarakat**  
**Lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Kuala**  
**Tahun 2013 s.d. 2017**

Uraian	Capaian				
	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6
Satuan/unit pelayanan yang melaksanakan survey	46	46	46	46	45
Satuan/unit pelayanan yang menyampaikan laporan survey	37	41	41	46	45

Satuan/unit pelayanan yang capaian indeksnya > 80	12	21	23	38	26
---	----	----	----	----	----

Sumber : *Bagian. Organisasi.*

Tabel di atas memperlihatkan adanya perubahan capaian nilai IKM yang drastis dimulai adanya peningkatan jumlah SKPD yang mendapat nilai diatas 80 dari tahun 2015 ke tahun 2016, kemudian ditahun 2017 mengalami penurunan yang signifikan terhadap jumlah SKPD/unit kerja yang memperoleh capaian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari 38 SKPD/unit kerja yang memperoleh nilai diatas 80 pada tahun 2016 menjadi hanya 26 SKPD pada tahun 2017, atau turun sebanyak 12 SKPD/unit kerja.

Secara umum permasalahan pelaksanaan pelayanan publik di Kabupaten Barito Kuala adalah :

- a. Belum semua unit pelayanan memiliki dan menerapkan standar pelayanan, akibatnya prosedur dan kepastian persyaratan, biaya dan waktu pelayanan masih dianggap masyarakat masih rumit, berbelit-belit, dan tidak transparan.
- b. Masih kurangnya tingkat disiplin, kemampuan dan keterampilan aparatur dalam memberikan pelayanan pada beberapa unit pelayanan.
- c. Belum ada sarana pengaduan masyarakat pada beberapa unit pelayanan yang refresentatif mengakomodir keluhan dan pengaduan masyarakat.

Untuk mengatasi penurunan nilai kepuasan masyarakat ini diperlukan komitmen seluruh SKPD/unit kerja untuk mengambil langkah-langkah, antara lain:

- a. Membangun dan mengembangkan inovasi-inovasi pelayanan pada semua unit pelayanan sesuai kebutuhan.
- b. Memperkuat penerapan standar pelayanan dan standar operasional prosedur (SOP) pada semua jenis pelayanan.

### 2.3.2 CAPAIAN KINERJA SASARAN TAHUN 2017

Secara umum capaian kinerja sasaran, Sekreariat Daerah Kabupaten Barito Kuala tahun 2017 telah dapat dilaksanakan, dengan gambaran pencapaian sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.16**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Sekretariat Daerah**  
**Tahun 2017**

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target	realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>A</b>	<b>MISI KE-1 : Meningkatkan kapasitas kelembagaan Sekretariat Daerah</b>					
1	Meningkatnya manajemen administrasi	Optimalisasi pelayanan administrasi dan tata kelola perkantoran yang baik dan professional	%	100	100	100
		Optimalisasi penyediaan kebutuhan sarana dan prasaranan kedinasan aparatur dalam menunjang kinerja	%	100	100	100
		Presentase unit pelaksana teknis kegiatan lingkup Sekretariat Daerah yang memiliki dan menerapkan sistim data base sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan.	%	60	75	125
		Persentase Unit pelaksana teknis (Kasubbag) Sekretariat daerah yang memiliki dan menggunakan dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP).	%	60	30	50
		Persentase terfasilitasinya kegiatan KDH	%	100	100	100
2	Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur	Persentase aparatur yang memiliki sertifikat diklat/bintek/workshop keahlian teknis	Persen	70	65	93
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah (angka)	Kategori	b	b	100
<b>B</b>	<b>MISI KE-2 : Menyelenggarakan pemerintahan dengan orientasi pada governance entrepreneurship.</b>					
1	Terwujudnya peningkatan nilai investasi di daerah	Persentase peningkatan Investasi di Daerah.	%	0	0	0
<b>C</b>	<b>MISI KE-3 : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pradigma reformasi birokrasi</b>					
1	Terwujudnya	Persentase aset tanah	%	26	23	88,5

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target	realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
1	harmonisasi, sinkronisasi dan kepastian hukum penyelenggaraa n pemerintahan daerah	pemerintah daerah memiliki SHP.				
		Persentase terselesaikannya permasalahan batas administratif wilayah Kab. Barito Kuala dengan Kabupaten tetangga.	%	100	95	95
		Persentase terselesaikannya permasalahan batas administratif antar kecamatan / desa /kelurahan, di Kab. Barito Kuala.	%	27	27	100
		Persentase efektifitas penerapan kebijakan daerah (Perda)	%	100	100	100
2	Terwujudnya keterbukaan informasi penyelenggaraa pemerintahan	Persentase daerah kecamatan/kelurahan/desa yang dijangkau dan menerima informasi hasil kegiatan pemerintahan dan pembangunan	%	100	100	100
3	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah	Status LKPJ (status)	Status	diterim a	diterima	100
		Nilai LPPD	Nilai	3.25	3.2640*	100,4*
		Nilai Evaluasi LKIP Kabupaten	status	8,5	8,12*	95,5
		Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	B >60	CC 55,73	93
4	Terwujudnya tertib pelayanan pemerintahan	Fasilitasi pengadaan barang dan jasa yg dilaksanakan melalui melalui LPSE	%	100	100	100
		Persentase SKPD pelayanan public berkategori Sangat Baik (Nilai di atas 80)	%	30	19	63,33
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kabupaten	%	85	82	96,5
5	Terpenuhinya kepastian pemenuhan kebutuhan	Persentase RTS yang menerima raskin	%	0	0	0
		Persentase realisasi penyaluran hibah sosial	%	100	100	100

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target	realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
	bantuan sosial dan keagamaan					

Adapun perbandingan untuk capaian kinerja sasaran pertahun dari 2013-2017, dapat dilihat pada tabel di berikut ;

**Tabel 2.17**  
**Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran**  
**Sekretariat Daerah Tahun 2013-2017**

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Satuan	2013			2014			2015			2016			2017		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
						5			6			7	8			9		
<b>A</b>	<b>MISI KE-1 : Meningkatkan kapasitas kelembagaan Sekretariat Daerah</b>																	
1	Meningkatnya manajemen administrasi	Optimalisasi pelayanan administrasi dan tata kelola perkantoran yang baik dan profesional	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Optimalisasi penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana kedinasan aparatur dalam menunjang kinerja	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Presentase unit pelaksana teknis kegiatan (Kasubbag) lingkup Sekretariat Daerah yang memiliki dan menerapkan sistim data base sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan.	%	30	35	117	40	35	87,5	50	62	125	50	62	125	60	75	125
		Persentase Unit pelaksana teknis (Kasubbag) Sekretariat daerah yang memiliki dan menggunakan dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP).	%	30	25	83,33	40	30	75	40	30	75	50	30	60	60	30	30
		Persentase terfasilitasinya	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Satuan	2013			2014			2015			2016			2017		
				Targ et	Reali sasi	%	Targ et	Reali sasi	%	Targ et	Reali sasi	%	Targ et	Reali sasi	%	Targ et	Reali sasi	%
						5			6			7	8			9		
		kegiatan KDH																
2	Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur	Persentase aparatur yang memiliki sertifikat diklat/bintek/workshop keahlian teknis	Persen	57	53	93	60	65	92	63	60	95,24	66	63	95,45	70	65	93
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah (angka)	%	c	c	100	cc	cc	100	cc	cc	100	b	b	100	b	b*	100
<b>B</b>	<b>MISI KE-2 : Menyelenggarakan pemerintahan dengan orientasi pada governance entrepreneurship.</b>																	
1	Terwujudnya peningkatan nilai investasi di daerah	Persentase peningkatan Investasi di Daerah.	%	10	22	220	10	12	120	10	10	10	5	3,6	70	0	0	0
<b>C</b>	<b>MISI KE-3 : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pradigma reformasi birokrasi</b>																	
1	Terwujudnya harmonisasi, sinkronisasi dan kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase aset tanah pemerintah daerah memiliki SHP.	%	9	22	41	13	22	170	20	22	110	23	22	95,65	26	22	88,5
		Persentase terselesaikannya permasalahan batas administratif wilayah Kab. Barito Kuala dengan Kabupaten tetangga.	%	90	90	15	95	90	95	98	95	97	100	95	95	100	95	95
		Persentase terselesaikannya permasalahan batas administratif antar kecamatan / desa /kelurahan, di Kab. Barito	%	5	5	100	7,4	7,4	100	14	14	100	23	23	100	27	27	100

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Satuan	2013			2014			2015			2016			2017		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
		Kuala.				5			6			7	8			9		
		Persentase efektivitas penerapan kebijakan daerah (Perda)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	72	72	100	100	100
2	Terwujudnya keterbukaan informasi daerah	Persentase kecamatan/kelurahan/desa yang menerima informasi hasil kegiatan pemerintahan dan pembangunan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah	Status LKPJ (status)	Status	diterima	diterima	100	diterima	diterima	100	diterima	diterima	100	diterima	diterima	100	diterima	diterima	100
		Nilai LPPD	Nilai	2,7	2,7939	103	2,85	3,1547	110,7	3	3,0147	100,49	3,15	3,264	103,6	3,25	3,264*	100,4*
		Nilai Evaluasi LKIP Kabupaten	Nilai			-	7	7,48	99,7	7,5	6,48	81	8	8,12	101,5	8,5	8,12*	95,5*
		Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai			-	CC >50	C 46,09	92	CC >50	CC 50,02	100	B >60	CC 55,73	93	B	55,73*	93*
4	Terwujudnya tertib pelayanan pemerintahan	Fasilitasi pengadaan barang dan jasa yg dilaksanakan melalui LPSE	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase pelayanan SKPD public berkategori Sangat Baik (Nilai di atas 80)	%	10	25	250	15	15,2	101	20	22	110	25	22*	88	30	19	63,33
		Nilai IKM Kabupaten	Nilai rata-rata	77	63,4	82,34	79	71,1	90	81	71,4	88	83	85,5	103	85	82	96,5
5	Terpenuhiny	Persentase RTS yang	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0

No	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Satuan	2013			2014			2015			2016			2017		
				Targ et	Reali sasi	%	Targ et	Reali sasi	%	Targ et	Reali sasi	%	Targ et	Reali sasi	%	Targ et	Reali sasi	%
						5			6			7	8			9		
	a kepastian pemenuhan kebutuhan bantuan sosial dan keagamaan	menerima raskin Persentase realisasi penyaluran hibah sosial	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b>					<b>100,22</b>			<b>106,3</b>			<b>99,6</b>			<b>95,5</b>			<b>94</b>

### **2.3.3 CAPAIAN KINERJA KEUANGAN TAHUN 2013-2017**

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Sekretariat Daerah dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2017, khususnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Sekretariat Daerah Kab. Barito Kuala Tahun 2017. Total anggaran keseluruhan belanja Sekretariat Daerah selama tahun 2017 sebesar Rp. 56.916.478.417,- (terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 26.386.704.795,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 30.529.773.622,- ) dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 54.698.777.907,-(96,10) (terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 25.639.780.304,- (97,2% ) dan Belanja Langsung sebesar Rp 29.058.997.603,- (95,18%)) atau dengan serapan dana APBD mencapai 96,1%, dengan demikian terdapat silpa sebesar Rp. 2.217.700.510,- atau sebesar 3,9% pada tahun 2017.

Tabel 2.18  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayananan Sekretariat Daerah  
 Kabupaten Barito Kuala

Uraian	Anggaran Pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					rata-rata pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Kinerja Utama 1																	
mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah																	
Kinerja Utama 2																	
Terwujudnya tertib pelayanan pemerintahan																	
	27,808,169,500	23,865,460,200	27,817,931,000	18,565,618,100	17,467,760,100	25,003,169,333	20,386,540,245	24,117,931,082	16,165,618,189	14,967,760,151	90	85	87	87	86		

Adapun rincian pagu beserta realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja Sekretariat Daerah Kab. Barito Kuala Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.18.1**  
**Pagu Dan Realisasi Anggaran Kegiatan Spesifik Terkait Capaian Tujuan Dan Sasaran Kinerja Sekretariat Daerah Kab. Barito Kuala Tahun 2017**

No.	Unsur Dinilai	Jumlah Indikator	Kinerja Rata-Rata		Anggaran 2017	
			Capaian (%)	Interprestasi	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>A</b>	<b>MISI 1 : Meningkatkan kapasitas kelembagaan Sekretariat Daerah</b>					
1.	Tujuan 1 Sasaran 1	5	91	Memuaskan	7.011.315.276	95
2.	Tujuan 1 Sasaran 2	1	93	Memuaskan	32.575.263	96
3.	Tujuan 1 Sasaran 3	1	100	Memuaskan	15.030.000	91
<b>B</b>	<b>MISI 2 : Menyelenggarakan pemerintahan dengan orientasi pada governance entrepreneurship.</b>					
1.	Tujuan 2 Sasaran 4	1	0	Target 0	0	0
<b>C</b>	<b>MISI 3 : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pradigma reformasi birokrasi</b>					
1.	Tujuan 3 Sasaran 5	4	96	Memuaskan	259.549.740	88
2.	Tujuan 3 Sasaran 6	1	100	Memuaskan	6.976.417.467	95
3.	Tujuan 3 Sasaran 7	4	97	Memuaskan	133.071.100	96
4.	Tujuan 3 Sasaran 8	3	87	Memuaskan	468.100.368	96
5.	Tujuan 3 Sasaran 9	2	100	Memuaskan	71.700.937	93
<b>JUMLAH</b>		<b>20</b>	<b>94</b>	<b>Memuaskan</b>	<b>14.967.760.151</b>	<b>93,75</b>

Dari tabel di atas dapat diketahui, hal-hal sebagai berikut ;

- Capaian kinerja rata-rata atas tujuan dan sasaran beserta indikator sasaran yang dilaksanakan Sekretariat Daerah pada tahun 2017 sebesar 94% dengan kategori capaian ' **MEMUASKAN**'.
- Besar total pagu anggaran kegiatan yang terkait langsung dengan pencapaian indikator sasaran sebagai unsur penilaian kinerja tahun 2017

sebesar Rp. 15.733.113.707,- dengan realisasi sebesar Rp. **14.967.760.151,-** atau sebesar **93,75%**.

- c) Khusus untuk misi ke 2 ;Menyelenggarakan pemerintahan dengan orientasi pada governance entrepreneurship dengan sasaran terwujudnya peningkatan nilai investasi di daerah dan indikator kinerja Persentase peningkatan Investasi di daerah, pada tahun 2017 Sekretariat Daerah tidak mematok target untuk indicator dimaksud, karena urusan penanaman modal yang sebelumnya ditangani oleh Sekretariat Daerah melalui Bagian Ekonomi dan Penanaman Modal sejak ditetapkannya Peraturan Daerah No.16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati No. 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat. Namun demikian untuk pelaksanaan promosi daerah melalui pelaksanaan pameran pembangunan daerah tetap dilaksanakan karena merupakan agenda daerah.

Proses pencapaian Misi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala sampai dengan Tahun 2017 sebagai tahun keempat Renstra 2013-2017, dapat diinformasikan uraian realisasi anggaran dalam kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan pagu RENSTRA, sebagai berikut :

**Tabel 2.19**  
**Penyerapan Anggaran pada setiap Sasaran Sekretariat Daerah**  
**Kabupaten Barito Kuala 2013-2017**

No	Unsur Dinilai	Pagu Indikatif Renstra (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun					Jumlah	% (dari Pag)
			2013	2014	2015	2016	2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>A</b>	<b>MISI 1 : Meningkatkan kapasitas kelembagaan Sekretariat Daerah</b>								
1.	Tujuan 1 Sasaran 1	79,134,422,000	16,780,226,533	16,448,443,810	18,450,441,881	12,331,011,022	7.011.315.276	71,021,438,522	90
2.	Tujuan 1 Sasaran 2	1,122,500,000	123,178,850	152,391,800	170,272,360	74,919,700	32.575.263	553,337,973	49
3.	Tujuan 1 Sasaran 3	217,596,000	41,188,150	38,478,400	14,403,000	11,596,000	15.030.000	120,695,550	55
	<b>Jumlah</b>	<b>80,474,518,000</b>	<b>16,944,593,533</b>	<b>16,639,314,010</b>	<b>18,635,117,241</b>	<b>12,417,526,722</b>	<b>7.058.920.539</b>	<b>71,695,472,045</b>	<b>89</b>
<b>B</b>	<b>MISI 2 : Menyelenggarakan pemerintahan dengan orientasi pada governance entrepreneurship.</b>								
1.	Tujuan 2 Sasaran 4	874,000,000	112,861,250	126,395,950	108,490,500	130,232,500	0,-	477,980,200	55

No	Unsur Dinilai	Pagu Indikatif Renstra (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun					Jumlah	% (dari Pag)
			2013	2014	2015	2016	2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Jumlah</b>	<b>874,000,000</b>	<b>112,861,250</b>	<b>126,395,950</b>	<b>108,490,500</b>	<b>130,232,500</b>	<b>0,-</b>	<b>477,980,200</b>	<b>55</b>
<b>C</b>	<b>MISI 3 : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pradigma reformasi birokrasi</b>								
1.	Tujuan 3 Sasaran 5	8,141,330,000	4,646,693,950	637,185,710	637,030,341	494,528,250	259.549.740	6,674,987,991	82
2.	Tujuan 3 Sasaran 6	15,161,440,000	3,052,711,100	2,767,305,200	3,099,487,100	2,661,042,617	6.976.417.467	18,556,963,484	122
3.	Tujuan 3 Sasaran 7	256,000,000	40,862,000	48,724,100	48,792,400	54,866,600	133.071.100	326,316,200	127
4.	Tujuan 3 Sasaran 8	849,638,000	133,772,500	150,981,025	563,208,500	339,477,000	468.100.368	1,655,539,393	195
5.	Tujuan 3 Sasaran 9	455,000,000	71,675,000	16,634,250	25,805,000	67,944,500	71.700.937	253,759,687	56
	<b>Jumlah</b>	<b>24,863,408,000</b>	<b>7,945,714,550</b>	<b>3,620,830,285</b>	<b>4,374,323,341</b>	<b>3,617,858,967</b>	<b>7.908.839.612</b>	<b>27,467,566,755</b>	<b>110</b>
	<b>TOTAL JUMLAH</b>	<b>106,211,926,000</b>	<b>25,003,169,333</b>	<b>20,386,540,245</b>	<b>23,117,931,082</b>	<b>16,165,618,189</b>	<b>14.967.760.151</b>	<b>99,641,019,000</b>	<b>94</b>

Dari tabel di atas dapat diketahui, hal-hal sebagai berikut ;

- Besar total realisasi anggaran program-kegiatan yang terkait langsung dengan pencapaian indikator sasaran sebagai unsur penilaian kinerja pada Sekretariat Daerah Tahun 2013-2017 sebesar Rp. 99,641,019,000,-.
- Persentase realisasi anggaran program dan kegiatan terkait pencapaian indikator kinerja sasaran terhadap pagu indikatif Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2013-2017, sebesar 94%.
- Penyerapan anggaran yang terbesar ada pada pelaksanaan misi ke 3 : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pradigma reformasi birokrasi dengan penyerapan anggaran Tahun 2012-2017 sebesar Rp. 27,467,566,755 atau 110% dari pagu indikatif sebesar Rp. 24,863,408,000.

#### 2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah

Upaya Reformasi Birokrasi hingga kini masih saja belum mencapai titik akhir, masih banyak yang perlu diatur, dilaksanakan dan dikendalikan dalam implementasi penyelenggaraan pemerintahan disetiap level pemerintahan mulai pemerintah pusat hingga tingkat desa.

Sebagai pembuat regulasi dilevel Kabupaten fungsi Sekretariat Daerah

sangat vital dalam mengelola penyelenggaraan pemerintahan melalui pengawalan setiap pembentukan regulasi dan implementasi, melakukan analisis mendalam tentang kebutuhan akan berbagai regulasi yang dapat membantu berjalannya penyelenggaraan pemerintahan secara efektif, kedalam berbagai macam kebijakan secara legal formal dalam bentuk peraturan hukum daerah (Peraturan Daerah) dan kebijakan Kepala Daerah dalam bentuk Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati. Adapun beberapa kebijakan nasional yang perlu ditindak lanjuti melalui regulasi daerah, seperti kebijakan Reformasi Birokrasi, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Penataan organisasi.

Selain berfungsi menjalankan fungsi penataan regulasi Sekretariat Daerah juga memiliki peran yang besar dalam rangka fasilitasi, koordinasi dan pemantauan lintas SKPD atas semua pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang berasal dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat yang berlokus dan berdampak di wilayah kabupaten. Peran sentra yang dijalankan Sekretariat Daerah dalam hal ini secara institusional, dituntut memiliki komabilitas ( kemampuan untuk menyerap, memahami dan mengkomunikasi berbagai kebijakan diatas untuk diterapkan didaerah.

Disamping peluang dalam proses pencapaian kinerja Sekretariat daerah, ke depan menghadapi berbagai tantangan yang tidak mudah, menyangkut ;

- 1) Tuntutan Peraturan Perundang Undangan yang harus dipenuhi terutama pencapaian reformasi birokrasi, terwujudnya *Good Government, Good Governance dan Clean Government*.
- 2) Tuntutan untuk memperoleh penilaian kinerja (SAKIP) dengan nilai A
- 3) Tuntutan pencapaian target target pembangunan tingkat nasional maupun tingkat provinsi yang menjadi harus capaian pembangunan di Kab. Barito Kuala, seperti target pertumbuhan ekonomi.
- 4) Perkembangan ekonomi nasional maupun regional yang menuntut Sekretariat Daerah Kab. Barito Kuala berperan aktif dalam mendorong koordinasi dan fasilitas perkembangan ekonomi dan investasi ditingkat Kabupaten.
- 5) Perkembangan sector pertanian perkebunan yang telah berjalan dapat menimbulkan bahaya laten terkait konflik social.

**BAB III****PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH****3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah**

Implementasi kinerja Sekretariat Daerah tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung maupun faktor penghambat, yang memungkinkan tercapai atau tidaknya kinerja secara optimal. Dalam pembahasan sub bab ini akan lebih berfokus pada analisis faktor penghambat kinerja Sekretariat Daerah. Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah yang berkaitan dengan pelayanan kepada Kepala Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah, yaitu permasalahan pada kebijakan, Program Kegiatan dan kebutuhan teknis operasional.

Pada tataran kebijakan Sekretariat Daerah dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah sebagai berikut :

- 1) Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Tahun 2016 sebesar 55,93 katagori CC = cukup memadai, hal ini belum mencapai target kabupaten tahun 2017 yang menargetkan mendapat kategori B dengan skor 60-70. Jika dibandingkan capaian tahun 2013 meningkat kurang signifikan dengannilai 50,31 / katagori CC = CukupBaik.
- 2) Belum Optimalnya upaya peningkatan kualitas pelayanan Publik pada SKPD pelayanan termasuk Kecamatan. Pada tahun 2017 berdasarkan penilaian Tim Kabupaten Surat Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/282/KUM/2017 Tanggal 7 Juli 2017 tentang Penilaian Kompetisi Unit Pelayanan Publik, dari 46 SKPD pelayanan yang dinilai hanya sebesar 19% atau 9 SKPD yang mendapat nilai >80 berkategori "Baik". Sedangkan nilai IKM Kabupaten Tahun 2017 sebesar 82, dengan 26 SKPD/unit kerja yang mendapat IKM >80 (kategori baik) dari 45 SKPD/unit kerja.
- 3) Belum optimalnya capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Barito Kuala mendapat nilai 3,264 / Sangat Tinggi dari nilai maksimal 4.

- 4) Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi implementasi produk hukum daerah, terutama terhadap peraturan daerah dan peraturan bupati yang sudah tidak relevan lagi dan tidak dapat diimplementasikan.
- 5) Belum optimalnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang berorientasi reformasi birokrasi dilihat dari capaian nilai indeks reformasi birokrasi yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
- 6) Belum Optimalnya penataan kelembagaan perangkat daerah. Bahwa dalam rangka penataan kelembagaan pada tahun 2018 dilaksanakan evaluasi jabatan meliputi analisi jabatan dan analisi beban kerja, sedangkan secara kelembagaan SKPD akan dapat dievaluasi pada tahun 2019.

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Bagian / Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah, sebagai berikut :

- 1) Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian data capaian kinerja SKPD
- 2) Pelaksanaan publikasi kehumasan yang belum optimal menyentuk seluruh lapisan masyarakat.
- 3) SKPD yang menyampaikan laporan kinerja Tahun 2017 tepat waktu sebesar 70 %
- 4) SKPD yang menyusun PK tahun 2017 tepat waktu 60 %
- 5) Penyelesaian batas wilayah desa/kelurahan/kecamatan hingga tahun 2017 sebesar 27%
- 6) Jumlah tanah pemerintah daerah yang memiliki Sertifikat Hak Pakai (SHP) sebesar 22%.
- 7) Masih rendahnya kapasitas aparatur tingkat kecamatan
- 8) Belum optimalnya penyelenggaraan kewenangan bupati yang dilimpahkan ke kecamatan, pada level kecamatan.
- 9) Belum optimalnya penyelenggaraan ketertiban umum.
- 10) Secara kelembagaan organisasi perangkat daerah belum dilaksanakannya evaluasi terhadap dokumen analisis beban kerja dan analisis jabatan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Sekretariat Daerah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan, pengoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah dan pelayanan administratif., faktor internal yang mempengaruhi Sekretariat Daerah antara lain :

- 1) Belum dilaksanakannya evaluasi dan sosialisasi terhadap beban kerja dan analisis jabatan setiap jabatan lingkup Sekretariat Daerah sehingga aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan kinerja yang diinginkan.
- 2) Masih sedikitnya Bagian-bagian yang menerapkan system data base dalam pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan
- 3) Masih rendahnya unit kerja yang menerapkan SOP dalam pelaksanaan kegiatan.
- 4) Masih kurangnya pemahaman pegawai mengenai pentingnya membuat laporan kinerja secara tertulis atas kegiatan yang telah dilaksanakan, dalam suatu sistematika penyajian yang runtun dalam rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan
- 5) Kurangnya SDM perancang produk hukum daerah pada bagian Hukum;
- 6) Belum optimalnya pelaksanaan fungsi pemantau terhadap kebijakan daerah yang dilaksanakan Bagian-Bagian sesuai tugas pokok dan fungsi Bagian. Khususnya again Pemerintahan, Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bagian Ekonomi Pembangunan.
- 7) Komposisi penempatan sumberdaya aparatur pada bagian / unit kerja kurang merata.
- 8) Kurang memadainya prasarana kerja terutama computer/laptop yang belum sepenuhnya dimiliki pejabat struktural dalam menunjang peningkatan kinerja aparatur.

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja

Sekretariat Daerah adalah :

- 1) Adanya kebijakan pemerintah pusat yang tidak dibarengi dengan aturan pelaksanaan yang jelas sehingga menimbulkan persepsi dan implementasi di daerah berbeda-beda
- 2) Adanya tuntutan target kinerja dari pemerintah lebih tinggi yang tidak dibarengi dengan kemampuan pemerintah daerah untuk melaksanakannya sehingga menimbulkan pengaruh terhadap kinerja Sekretariat Daerah.
- 3) Masih banyak terjadi konflik norma dan egosektoral Pemerintah Pusat sehingga berdampak ke Pemerintah Daerah.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi, misi Kepala Daerah secara umum menjiwai materi Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2017-2022. dimana visi-misi-tujuan-sasaran beserta indikator sasaran yang termuat dalam RENSTRA Sekretariat Daerah mengacu pada Misi-Tujuan- Sasaran beserta Indikator Sasaran RPJMD tahun 2017-2022 yang telah ditetapkan melalui , sehingga terwujud sinkronisasi dengan urusan pemerintahan, tugas pokok dan fungsi yang menjadi kewenangan Sekretariat Daerah.

#### **3.21 VISI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

Amanat Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025, bahwa periode RPJMD 2017 – 2022 merupakan tahapan IV (keempat) dari pentahapan pembangunan jangka menengah yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Barito Kuala. Pada tahapan keempat ini ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera disegnap wilayah dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan melalui peningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemantapan struktur ekonomi dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya, peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat, peningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum, dan bersesuaian dengan rencana tata ruang wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.

Dalam tahapan keempat ini maka dicirikan oleh mantapnya berbagai sistem pembangunan, kemandirian dan daya daerah yang makin tinggi, tingkat perkembangan wilayah berada diatas rata-rata nasional dan secara umum mampu bersaing dalam lingkup Asean bahkan pada beberapa bagian bahkan sudah mampu bersaing dalam skala Asia-Pasific. Secara umum kualitas SDM sudah baik dengan tingkat pendidikan keahlian dan ketrampilan yang memadai; perekonomian tumbuh diatas rata-rata nasional dengan tingkat ketimpangan yang rendah; prasarana dan sarana dasar telah menjangkau kesegnap pelosok wilayah; pemerintahan yang berjalan secara efisien, efektif, transparan dan akuntabilitasnya tinggi diikuti penegakan hukum tanpa pandang bulu; serta penataan ruang menjadi acuan pengembangan wilayah dengan keseimbangan ekosistem yang baik dan

terjaganya keanekaragaman hayati yang tinggi.

Mengacu pada apa yang diamanatkan oleh RPJPD Kabupaten Barito Kuala 2005 – 2025, maka Visi Bupati dan Wakil Bupati Barito Kuala yang sekaligus menjadi Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 – 2022 adalah

**“Terwujudnya Barito Kuala Satu Kata Satu Rasa, Untuk Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera (Batola Setara)”**

**Makna Kata Pada Visi :**

- 1) **Satu Kata**, adalah kondisi masyarakat yang mempunyai pola pikir, satu pemahaman, satu tekad, satu tujuan dalam membangun Barito Kuala harus bersama-sama, dengan pendekatan “Membangun Desa Menata Kota” berdasarkan potensi sumberdaya alam perdesaan, perkotaan dan sumber daya manusia yang tersedia.
- 2) **Satu Rasa**, memposisikan pemimpin mempunyai kepekaan terhadap kondisi permasalahan yang dihadapi masyarakat, sehingga prioritas program berorientasi pada kepentingan masyarakat. Oemimpi menempatkan masyarakat dalam kedudukan dan posisi yang “Setara” proporsional, apa yang dirasakan para pemimpin juga dirasakan oleh masyarakat.
- 3) **Setara**, adalah perpaduan kata Satu Kata dan Satu Rasa dan “Setara” mengandung makna sejajar, setingkat, menunjukkan bahwa Kabupaten Barito Kuala, menjadi kabupaten yang sejajat dengan kabupaten lainnya, juga kemajuan pembangunan di perdesaan dan kecamatan dapat mengantarkan kesejahteraan dengan desa dan kecamatan lainnya.
- 4) **Satu Kata Satu Rasa**, sebagai suatu pola pikir menempatkan seluruh kegiatan pemerintahan serta perlakuan program dan kegiatan pembangunan senantiasa diproyeksikan untuk kepentingan masyarakat. Pembangunan tidak diperuntukkan bagi golongan masyarakat atau kelompok tertentu. Pembangunan tidak untuk kepentingan pemimpin belaka. “Satu Kata Satu Rasa” menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas pertama dan utama dalam pembangunan di Kabupaten Barito Kuala.
- 5) **Satu Kata Satu Rasa**, sebagai pola sikap perilaku dan pola pikir menempatkan kata hati yang paling dalam sebagai harapan untuk dapat

semata-mata mengabdikan diri kepada masyarakat Kabupaten Barito Kuala yang menjadi komponen penting Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai suatu ibadah.

### **Skenario Singkat Pembangunan Berdasarkan Visi**

Pada Visi Kabupaten Barito Kuala “Terwujudnya Batola Setara , Barito Kuala Satu Kata Satu rasa, Untuk Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera” terdapat 4 (empat) kata kunci, yakni :

- 1) Satu Kata, Satu Rasa
- 2) Membangun Desa
- 3) Menata Kota
- 4) Masyarakat Sejahtera

**Satu Kata Satu Rasa**, adalah amanah dari pendiri Kabupaten Barito Kuala yang tertuang dalam lambing Kabupaten “SELIDAH” tertanam falsafah kehidupan bahwa, membangun Kabupaten Barito Kuala harus mengutamakan kebersamaan, gotong royong dan saling berperan, sehingga proses pembangunan, hingga hasil-hasil pembangunan dapat dirasakan dan ikut merasakan, rasa memiliki, tanggung jawab dan keberlangsungannya. Masyarakat tidak hanya sebagai obyek pembangunan namun juga sebagai subyek pembangunan itu sendiri.

**Membangun Desa**, adalah upaya nyata yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang langsung dirasakan masyarakat perdesaanyang selama ini masih terasa adanya kesenjangan dalam pemerataan pembangunan infrastruktur dasar, akses pendidikan, akses kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Data hasil sensus yang dilaksanakan oleh BPS tahun 2014, di barito Kuala masih terdapat 11 desa sangat tertinggal dan 34 desa berstatus tertinggal, baik menggunakan Indikator Pembangunan desa (IPD), maupun Indikator Desa Membangun (IDM). Kondisi ketertinggalan tersebut harus dicermati penyebabnya, dengan demikian Perangkat Daerah sebagai lembaga teknis pemerintah harus mampu menyusun program dan kegiatan yang tepat sasaran dan tepat tujuan untuk mempercepat pengentasan ketertinggalan desa dimaksud. Pola sinergitas pembangunan perdesaan yang saat ini mendapat dukungan dari pemerintah pusat melalui Dana Desa (DD), dan Anggaran Dan Desa (ADD) akan lebih cepat mengentaskan status desa sangat tertinggal dan desa tertinggal dimaksud hingga berstatus desa berkembang dan mandiri.

**Menata Kota**, kota dalam hal ini adalah kota kabupaten sebagai Ibukota Kabupaten Barito Kualadan Kota Kecamatan, kedua kota ini perlu ditata lebih maksimal agar fungsi pelayanan, pengembangan, interaksi masyarakat penataan bangunan dan fasilitas lainnya sesuai ruang peruntukannya, antara lain sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat pendidikan, pelayanan kesehatan, pusat pengembangan sumber daya lainnya. Selain itu mengacu pada Peraturan menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kota Layak Anak, diharapkan dalam penataan kota secara baik dan berkelanjutan nantinya terwujudnya Kota Layak Anak, atau Ramah Anak.

Lembaga Pemerintah sebagai akses Pelayanan Masyarakat, Fasilitas untuk Umum, harus ditata sedemikian rupa, agar menjadi kota yang “BAHALAP” yakni Bagus, Cantik, Indah, Ganteng (Bhs Bakumpai) atau dapat di artikan dengan Bagus, Aseri, Harmonis, Agamis, Langkar, Aman dan Pantas. Ini menjadi impian kita semua untuk mewujudkannya.

### **322 MISI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi serta dapat memberikan arah dan petunjuk garis-garis besar cara pencapaian visi. Perumusan misi dalam dokumen RPJMD dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis baik eksternal maupun internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada pada pembangunan daerah dan sebaiknya pernyataan misi penggunaan bahasa yang sederhana, ringkas dan mudah dipahami tanpa mengurangi maksud yang ingin dijelaskan.

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022, maka misi Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022 adalah sebagai berikut ;

- 1) Mengintegrasikan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Kemandirian Desa dan Penataan Kota
- 2) Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalui Inovasi Teknologi Berbasis Pertanian
- 3) Meningkatkan Kualitas Ketaqwaan, Kecerdasan, Kesehatan dan Profesionalitas Sumber Daya Manusia

- 4) Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani

### **Skenario Singkat Pembangunan Berdasarkan Misi**

**1) Misi I, Mengintegrasikan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Kemandirian Desa dan Penataan Kota**

Untuk mempercepat pembangunan di perdesan dan perkotaan, terdapat 3 (tiga) titik penting yakni, pemerataan kualitas infrastruktur dasar, pemenuhan sarana dan prasarana permukiman, dan peningkatan kualitas lingkungan. Dengan pemerataan infrastruktur dasar, pemenuhan air bersih, energi, jalan, akses ekonomi, dan pendukung lainnya dapat dipenuhi diharapkan desa yang masih Tertinggal dapat meningkat statusnya menjadi Berkembang dan desa Berkembang dapat meningkat statusnya menjadi Desa Mandiri.

**2) Misi II, Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalui Inovasi Teknologi Berbasis Pertanian**

Potensi utama Kabupaten Barito Kuala adalah sektor Pertanian, yang sampai saat ini menjadi unggulan daerah dan pendukung stok pangan Kalsel, akan tetapi produk hilir dari hasil pertanian itu perlu dikembangkan dan ditingkatkan, agar nilai tambah para petani akan lebih berdaya saing, potensi pertanian masing-masing kecamatan mempunyai keunggulan yang berbeda-beda, hal ini merupakan anugerah dari Allah SWT, yang wajib kita syukuri, dengan cara meningkatkan kecerdasan dan keterampilan masyarakat harus dilakukan, agar mampu untuk mengoptimalkan hasil produk-produk pertanian yang mereka miliki, dengan pemberian pelatihan yang praktis, sederhana dengan sentuhan teknologi tepat guna dan sejenisnya. Peluang yang sangat mendukung adalah berkembangnya kualitas infrastruktur antar kabupaten, antar kecamatan yang hampir merata, hal ini menjadi point penting untuk pengembangan produk olahan, baik sebagai kebutuhan sehari-hari maupun sebagai oleh-oleh masyarakat yang berkunjung ke Barito Kuala.

**3) Misi III, Meningkatkan Kualitas Ketaqwaan, Kecerdasan, Kesehatan dan Profesionalitas Sumber Daya Manusia**

Pengembangan Potensi Sumber Daya Manusia menjadi sangat penting, dalam rangka percepatan terwujudnya masyarakat yang sejahtera lahir dan

bathin, dengan potensi sumber daya alam Kabupaten Barito Kuala yang makmur; pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, semua itu memerlukan sumber daya manusia yang handal, terampil, kreatif, dan mampu bersaing. Untuk mengelola dan mengembangkan potensi itu, perlu upaya nyata dalam berbagai bidang pendidikan, seperti penguatan pendidikan kejuruan, pendidikan non-formal, pelatihan tenaga kerja masyarakat produktif, dan sejenisnya yang menghasilkan berbagai produk olahan dan hasil kreatifitasnya untuk mampu bersaing dengan produk lainnya.

Semua niat untuk mengupayakan sebagaimana tersebut di atas belum menjamin untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat lahir dan bathin, manakala potensi masyarakat yang sangat agamis ini belum ditangani dengan program dan kegiatan yang benar-benar, sesuai dengan kondisi masyarakat di semua jenjang khususnya bidang keagamaan.

Poin penting untuk menangani kehidupan beragama yang harmonis secara terpadu, peran lembaga yang berkompeten, antara lain; Kementerian Agama, lembaga Keagamaan, tokoh agama, dan pemerintah daerah itu sendiri sangat menentukan.

Program dan kegiatan Baca Tulis Al Quran, salah satu bentuk program di masyarakat yang sudah mengakar, berkembang dan merata di seluruh pelosok Kabupaten Barito Kuala harus mendapat perhatian, agar lembaga masyarakat Barito Kuala yang mengelola lembaga Baca Tulis Al Quran, mampu terus berkembang dan eksis, dalam upaya meningkatkan Keimanan, dan Ketaqwaan sejak dini, dan diharapkan dimasa mendatang melahirkan generasi yang Berakhlaqul Qarimah, generasi yang mampu mengelola sumber daya alam yang melimpah ini tidak semena-mena, dan tidak menyimpang dari ajaran Agama dan ketentuan yang berlaku.

#### **4) Misi IV, Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani**

Pemerintahan yang baik diindikasikan dengan perencanaan yang berkualitas, pelaporan keuangan yang akuntabel, transparan, partisipatif. Era saat ini adalah era transparansi, tidak ada program dan kegiatan yang tidak boleh diketahui masyarakat, tuntutan bagi semua pemangku kepentingan,

pemangku program dan kegiatan dalam hal ini semua perangkat daerah, harus mampu mewujudkan program dan kegiatan yang pro rakyat, yang dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat lahir dan bathin, dengan demikian maka langkah nyata yang harus diikuti adalah sistem yang dibangun harus menggunakan basis IT, langkah ini diharapkan dapat memperkecil peluang adanya sasaran, kebijakan, program, atau kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prinsip *e-Government*, yang dikembangkan harus menjadi prioritas, dengan demikian, bentuk pendekatan "*e-Planning and e-Budgeting*", *e-DataBase*" serta "*e-Evaluating*". Untuk mengimplementasikan semua system aplikasi ini diperlukan kehandalan sumberdaya manusia dalam penguasaan teknologi informatika.

Dicermati dari gambaran visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Kab. Barito Kuala Tahun 2017-2022 berikut penjelasan dan penjabarannya, merupakan wujud tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang secara nyata sebagai arah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan pembangunan di Kabupaten Barito Kuala untuk periode Tahun 2017-2022.

### **323 PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih secara teknis operasional terjabarkan pada program dan kegiatan prioritas terpilih atas penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib maupun urusan pilihan, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun program pembangunan daerah prioritas yang termuat dalam RPJMD Kab. Barito Kuala Tahun 2017-2022, yakni ;

- 1) Program Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur perdesaan
- 2) Program peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan
- 3) Program peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
- 4) Program Peningkatan produksi pertanian secara luas dengan mengembangkan diversifikasi usaha dan produk olahan berbasis pertanian

- 5) Program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan
- 6) Program pengembangan system pendukung bagi usaha mikro, kecil dan menengah
- 7) Program intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah
- 8) Program peningkatan kualitas pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar
- 9) Program peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat
- 10) Program peningkatan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja
- 11) Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan social
- 12) Program pembinaan dan pengembangan aparatur
- 13) Program peningkatan pelayanan publik

Sebagai tindak lanjut atas program dan kegiatan prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kab. Barito Kuala Tahun 2017-2022, maka sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dimiliki, Sekretariat Daerah menetapkan beberapa program kerja terpilih Tahun 2017-2022, antara lain ;

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Program peningkatan disiplin aparatur
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 5) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- 6) Program pengembangan data/informasi
- 7) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
- 8) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
- 9) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
- 10) Program Lingkungan Sehat Perumahan
- 11) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- 12) Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
- 13) Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)
- 14) Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
- 15) Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
- 16) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

- 17) Program pengembangan wawasan kebangsaan
- 18) Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
- 19) Program kerjasama informasi dengan mas media
- 20) Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
- 21) Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
- 22) Program peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama dan pembinaan kerukunan beragama
- 23) Program perencanaan pembangunan daerah
- 24) Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- 25) Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
- 26) Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan
- 27) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
- 28) Program pembangunan infrastruktur perdesaan
- 29) Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
- 30) Program pembinaan dan pengembangan aparatur
- 31) Program Peningkatan Pelayanan Publik
- 32) Peningkatan kualitas layanan pengadaan barang dan jasa

### **3.3 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri Dan Renstra Sekretariat Daerah Prov kalsel**

Mengingat salah satu tugas pokok Sekretariat Daerah yakni memantu Bupati dalam penyusunan kebijakan, pengoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah yakni dinas daerah dan lembaga teknis daerah dalam pelaksanaan seluruh urusan bidang pemerintahan dan pembangunan yang mencakup pemerintahan umum, organisasi, kesejahteraan rakyat, humas dan protokol, fasilitasi hukum, kegiatan perekonomian dan pembangunan, pelayanan pengadaan barang dan jasa dan pelayanan umum

Maka terkait dengan pelaksanaan Rencana Strategis Kementrian dan Rencana Strategis Provinsi, Sekretariat Daerah Kab. Barito Kuala secara umum berperan dalam mengkoordinasikan dan memfasilitasi berbagai program dan

kegiatan Kementrian dan Pemerintah Provinsi yang berfokus dan berlokus di wilayah Kabupaten Barito Kuala disamping penanganan teknis yang dilakukan SKPD terkait.

Berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 Tugas Sekretaris Daerah berdasarkan Pasal 213 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pada intinya Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Sekretaris Daerah mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan kebijakan pemerintah daerah;
- b) Pengkoordinasian pengelolaan keuangan daerah;
- c) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah, lembaga teknis daerah dan lembaga lain;
- d) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
- e) Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah;
- f) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Perangkat daerah tersebut merupakan unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diatas Sekretaris Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Kepala Daerah melantik Sekretaris Daerah berdasarkan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan dan integritas menjadi Sekretaris Daerah.

Dalam hubungan kerja dengan Kementrian Dalam Negeri, Sekretariat Daerah dituntut memiliki komabilitas dalam menterjemahkan dan melaksanakan berbagai kebijakan nasional terutama pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akan diberlakukan. Terhadap Rencana Strategis Kementrian Dalam Negeri tahun 2015-2019, baik Sekretariat Daerah maupun Kementrian Dalam Negeri saling mendukung terhadap upaya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang berkualitas didaerah, khususnya terhadap pencapaian tujuan Rencana Strategis Kementrian Dalam Negeri, yakni;

- 1) Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai

tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara, dengan sasaran strategis ;

- a) Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa;
  - b) Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas.
- 2) Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan di Daerah, dengan sasaran strategis ;
- a) Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
  - b) Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
  - c) Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
- 3) Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah, dengan sasaran strategis;
- a) Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.
- 4) Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa, dengan sasaran strategis ;
- a) Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat.
- 5) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya, dengan sasaran strategis ;
- a) Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan;
  - b) Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional.
- 6) Peningkatan tata kelola dan kualitas kelembagaan pemerintahan dalam negeri, dengan sasaran strategis ;

- a) Meningkatnya efektivitas dan produktivitas kerja Kementerian Dalam Negeri;
- b) Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri;
- c) Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri;
- d) Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi

Sedangkan keterkaitan dengan rencana strategis pemerintah propinsi Kalimantan selatan melalui 13 prioritas program Kalimantan selatan tahun 2016-2021, Sekretariat Daerah pada tingkat kabupaten terkait pada upaya pencapaian prioritas ke 5 yakni Kassel Menuju Pemerintahan Berkinerja Baik.

### **3.4 Telahan Rencana Tata Ruang Wlayah Dan Kajian Lingkungan Hidup**

#### **Strategis**

Secara teknis kinerja Sekretariat Daerah tidak terkait langsung dengan penerapan dokumen RTRW dan dokumen KLHAS Pemerintah Daerah, namun demikian secara substantive berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Sekretariat Daerah sangat berperan dalam menjaga implementasi kebijakan Pemerintah Daerah yang termuat dalam dokumen dan merumuskan kebijakan-kebijakan strategis lanjutan sebagai langkah-langkah efektif dalam mengendalikan pelaksanaan kebijakan-kebijakan daerah yang termuat dalam dokuen RTRW dan KLHS. Tidak terlaksannya dokumen KLHS dan RTRW akan berpengaruh pada kinerja pemerintah daerah.

Selain itu Sekretariat Daerah juga berperan dalam melaksanakan pemantauan terhadap implementasi ke dua dokumen dimaksud, yang kemudian digunakan untuk menyusun kebijakan lanjutan terkait upaya supervisi kebijakan RTRW dan KLHS.

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Adapun beberapa isu strategis daerah yang dapat difokuskan dan lokuskan menjadi isu strategis Sekretariat Daerah, antara lain ;

- 1) Belum optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi yang berorientasi pelayanan publik

Tuntutan penyelenggaraan reformasi birokrasi belum tuntas untuk terus dilaksanakan Sebagai langkah tindak Pemerintah Kab. Barito Kuala telah melaksanakan sebagian agenda reformasi birokrasi, dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 62 Tahun 2012 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan adalah restrukturisasi dan refungsionalisasi lembaga perangkat daerah, ketatalaksanaan (mekanisme dan standar operasional prosedur), pelayanan perijinan, sistem pengelolaan keuangan daerah, manajemen kepegawaian daerah, manajemen pelayanan kepada masyarakat, sistem pengawasan dan pengendalian internal serta artikulasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah, hingga segala upaya mewujudkan reformasi birokrasi telah melembaga dan membudaya pada pelaksanaan birokrasi di Kab. Barito Kuala.

Adapun permasalahan-permasalahan dalam penyelenggaraan reformasi birokrasi yang berorientasi tata kelola pemerintahan antara lain adalah sebagai berikut :

- a) Belum optimalnya akuntabilitas kinerja aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
  - b) Konsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran belum sepenuhnya terintegrasi dengan baik, sehingga masih ditemukan adanya beberapa kegiatan yang dilaksanakan tanpa adanya perencanaan yang jelas dan terukur.
  - c) Belum optimalnya pelaksanaan system pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
  - d) Kinerja lembaga legislatif dalam menghasilkan atau penetapan peraturan daerah belum optimal dengan berbagai kendala dan permasalahan yang menghambat capaian kinerja yang diharapkan
- 2) Evaluasi Kelembagaan Organisasi dan Manajemen Publik

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan kelembagaan (*Institutional re-engineering*) yang „ramping struktur, kaya fungsi“. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan di daerah baik struktur maupun infrastrukturnya, sedangkan

penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Langkah-lakah yang dapat diterapkan untuk menjawab isu strategis terkait penyelenggaraan manajemen publik yakni melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan profesionalisme birokrasinya, melalui penataan pegawai, melakukan evaluasi jabatan dan analisis beban kerja jabatan, meninjau kembali model pendidikan dan pelatihan pegawai, memperbaiki *reward and punishment system*, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

### 3) Penyelenggaraan Pelayanan Publik berorientasi E-Gov

Pergeseran pelayanan public dari konsep person to person dimana antara aparatur/ pelayanan dengan masyarakat/konsumen yang dahulunya berorientasi terjadi dikantor, kini posisi pemerintah selaku pemberi layanan dituntut untuk semakin dekat dengan masyarakat, pemberilaan pelayanan secara elektronik menjadi salah satu alternative efektif dalam pemberian pelayanan yang makin efisien kepada masyarakat. Sehingga perlu dikembangkan inovasi-inovasi pelayanan public, guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

### 4) Belum optimalnya implementasi produk hukum daerah.

Dalam aspek hukum masih ditemukannya peraturan peraturan hukum daerah (Peraturan Daerah) yang dalam pengimplementasiannya tidak dilaksanakan secara optimal, yang diindikasikan dengan permasalahan sebagai berikut;

- a) Terdapat Peraturan Daerah yang belum ditindak lanjuti dengan peraturan pelaksanaannya (Peraturan Bupati), sehingga terkendala dalam pelaksanaan.
- b) Tidak optimalnya kinerja unit pelaksana dan pengendali dalam pengimplementasi Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati.
- c) Adanya produk hukum daerah yang sudah tidak berlaku lagi namun belum dievaluasi.

### 5) Penanggulangan kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan tetap menjadi isu utama dan menjadi prioritas dalam pembangunan di berbagai daerah di Indonesia sejak lebih dari satu dasawarsa terakhir. Kemiskinan yang melanda masyarakat terutamanya adalah kemiskinan ekonomi sehingga masyarakat miskin sulit untuk memperoleh akses pelayanan dasar seperti: pendidikan,

kesehatan, tempat tinggal yang layak, pekerjaan dan lain sebagainya. Dalam rangka penanggulangan kemiskinan sangat diperlukan upaya konkrit dan terintegrasi melalui kerjasama antara masyarakat, dunia usaha dan pemerintah serta berbagai pihak (*working together to reduce poverty*) yang diharapkan akan dapat mempercepat kemandirian dan kesejahteraan masyarakat miskin. Pada tahun 2016, jumlah penduduk miskin di Kab. Barito Kuala sebanyak 15.710 jiwa atau sekitar 5,22 persen dari jumlah penduduk di Kabupaten Barito Kuala.

Adapun potensi pendukung bagi upaya penanggulangan kemiskinan di Kab. Barito Kuala, antara lain ;

- a) Barito Kuala masuk dalam kawasan strategis dalam pengembangan kota metropolitan Banjarbakula (Banjarmasin, Banjar, Banjarbaru, Barito Kuala dan Tanah Laut).
- b) Besarnya potensi perkebunan di Kabupaten Barito Kuala harus diselaraskan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- c) Sungai Barito merupakan jalur transportasi utama usaha pertambangan dan perkebunan di Kalimantan Selatan, juga memberikan manfaat besar bagi kegiatan perikanan dan pertanian.
- 6) Peningkatan perkembangan ekonomi Kabupaten Barito Kuala.

Beberapa tahun terakhir perkembangan perekonomian di Kabupaten Barito Kuala makin meningkat terutama dengan ;

- a) Hadirnya perkebunan-perkebunan industri di Wilayah Kabuapten Barito Kuala yang sudah memasuki tahun tahun produksi.
- b) Bekembangnya perumahan-perumahan di sekitar Kecamatan Alalak, Kecamatan, Mandastana, Kecamatan Anjir Muara.
- c) Dibangunnya beberapa universitas di Kec. Alalak, seperti Universitas Muhamadiyah Banjarmasin, Universitas Islam Kalimantan, dan Polekteknik Hasnus, kedepan dapat menjadikan Kec. Alalak sebagai kota pendidikan.
- d) Kabupaten Barito Kuala sebagai lumbung pangan provinsi.

Disamping akan berdampak positif pada meningkatnya kegiatan perekonomian daerah, keadaan ini dapat pula berakibat negatif pada munculnya ;

- a) Tingkat kriminalitas dan penyalahgunaan narkoba.
- b) Kesemerawutan penataan kota.
- c) Konflik pertanahan/wilayah, baik vertikal antar masyarakat dengan

perusahaan dan pemerintah daerah, maupun konflik horizontal antar warga masyarakat sebagai akibat meningkatnya nilai ekonomis lahan.

- d) Konflik sosial akibat kesenjangan ekonomi antar anggota masyarakat.

## **BAB IV**

### **TUJUAN, DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah**

Tujuan rencana strategis Sekretariat Daerah Tahun 2017-2022 dipilih dengan mengacu pada upaya pencapaian visi-misi-tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah daerah tahun 2017-2022, sehingga kinerja Sekretariat Daerah secara keseluruhan akan berdampak keberhasilan pembangunan daerah.

Secara umum dilihat dari tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah selaku unsur staf yang membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan, pengoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah dan pelayanan administratif. Maka seluruh misi-tujuan dan sasaran RPJM menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keberadaan Sekretariat Daerah selaku perangkat daerah.

Adapun tujuan dan sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah sebagai berikut :

TABEL 4.1

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah

No	Tujuan	Indikator	Formulasi Perhitungan Indikator Tujuan	sasaran	indikator	formulasi Perhitungan Indikator sasaran	Target Kinerja (%)				
							2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatkan penyelenggaraan reformasi birokrasi pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informatika	Indeks Reformasi Birokrasi		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan, Ketatalaksanaan, dan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Daerah	Persentase produk hukum daerah yang dievaluasi	Jumlah perda yang dijalankan DIBAGI Jumlah perda yang telah diterbitkan pada tahun berjalan X 100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel	Nilai SAKIP		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai LPPD	Jumlah item isian yg dapat terisi DIBAGI jumlah kegiatan yg direncanakan untuk dikerjakan sesuai indicator isian laporan X 100%	sangat tinggi	sangat tinggi	sangat tinggi	sangat tinggi	sangat tinggi
					Nilai SAKIP kabupaten komponen Laporan	Nilai Evaluasi AKIP diukur sesuai dengan Permenpan No. 20/2013 tentang Nilai Evaluasi AKIP Besaran Nilai berdasarkan hasil penilaian Tim KEMENPANRB	10	11	12	13	15
3	Meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat		Meningkatnya kualitaas pelayanan pemerintah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai IKM Pemkab	Nilai rata-rata IKM SKPD	85	87	89	91	93

**Tabel 4.2**  
**Keterkaitan Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis**  
**Sekretariat Daerah Dengan Visi dan Misi**  
**Tahun 2017-2022**

<b>VISI SETDA</b>		
<b>SEKRETARIAT DAERAH YANG REFORMIS, RESPONSIF DAN ASPIRATIF BAGI</b>		
<b>PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN KAB. BARITO</b>		
<b>KUALA</b>		
<b>MISI SETDA</b>	<b>TUJUAN SETDA</b>	<b>SASARAN SETDA</b>
(1)	(2)	(3)
<b>Misi 1:</b> <b>Meningkatkan kapasitas kelembagaan Sekretariat Daerah</b>	<b>Menerapkan seluruh kewenangan Sekretariat Daerah.</b>	<b>Sasaran 1 :</b> Meningkatnya manajemen administrasi
		<b>Sasaran 2 :</b> Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur
		<b>Sasaran 3 :</b> Meningkatnya akuntabilitas kinerja
<b>Misi 2:</b> <b>Menyelenggarakan pemerintahan dengan orientasi pada governance entrepreneurship.</b>	<b>Meningkankan penyelenggaraan governance entrepreneurship</b>	Terwujudnya peningkatan nilai investasi di daerah
<b>Misi 3:</b> <b>Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pradigma reformasi birokrasi</b>	<b>Mendorong pelaksanaan pemerintahan dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.</b>	<b>Sasaran 1 :</b> Terwujudnya harmonisasi, sinkronisasi dan kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah
		<b>Sasaran 2 :</b> Terwujudnya keterbukaan informasi penyelenggara pemerintahan
		<b>Sasaran 3 :</b> Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah

<b>VISI SETDA</b>		
<b>SEKRETARIAT DAERAH YANG REFORMIS, RESPONSIF DAN ASPIRATIF BAGI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN KAB. BARITO KUALA</b>		
<b>MISI SETDA</b>	<b>TUJUAN SETDA</b>	<b>SASARAN SETDA</b>
(1)	(2)	(3)
		<p><b>Sasaran 4 :</b> Terwujudnya tertib pelayanan pemerintahan</p> <p><b>Sasaran 5 :</b> Terpenuhinya kepastian pemenuhan kebutuhan bantuan sosial dan keagamaan</p>

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah maka diperlukan strategi dan kebijakan efektif. Strategi dan kebijakan terpilih akan menjadi acuan dalam pemilihan program dan kegiatan lima tahunan Sekretariat Daerah sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor : 13 Tahun 2006. Adapun strategi dan kebijakan Jangka Menengah Sekretariat Daerah Tahun 2017-2022 dimaksud adalah :

### a. Analisis Lingkungan Internal (ALI)

#### 1) Kekuatan/*Strenght* (S)

- a) Sumber daya aparatur secara kuantitas cukup memadai.
- b) Adanya komitmen yang kuat dari seluruh anggota organisasi dalam mewujudkan tujuan organisasi.
- c) Tugas dan fungsi yang luas dalam penyusunan kebijakan, pengoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah dan pelayanan administratif serta pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan daerah.
- d) Adanya pelimpahan urusan pemerintahan yang luas kepada pemerintah daerah yaitu dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- e) Adanya peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya.
- f) Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai yang menunjang penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah.

#### 2) Kelemahan/*Weakness* (W)

- a) Belum optimalnya pelaksanaan fungsi koordinasi yang dilaksanakan oleh unit kerja di Sekretariat Daerah.
- b) Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi yang up to date

- dan akurat sebagai sumber keijakan pemerintah daerah
- c) Belum optimalnya manajemen system akuntabilitas kinerja
  - d) Belum optimalnya pengintegrasian dan sinergitas berbagai potensi sumberdaya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.
  - e) Belum optimalnya pelaksanaan fungsi pemantauan dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
  - f) Belum optimalnya sistem pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Sekretariat Daerah
  - g) Kurangnya SDM perancang produk hukum daerah pada bagian Hukum

**b. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)**

**1) Peluang/*Opportubity* (O)**

- a) Penerapan teknologi informasi dalam Sistem informasi, khususnya dalam pemerintahan dapat meningkatkan mutu pelayanan publik dan membantu dalam proses pengolahan data dengan menggunakan sistem pengolahan basis data atau database yang cepat terutama dalam mewujudkan keterbukaan pelayanan public dan kemudahan pemberian pelayanan.
- b) Dalam memaksimalkan kinerja pemerintah daerah maka setiap 2 tahun Struktur Organisasi Perangkat Daerah dapat dievaluasi, hal ini dapat menjadi peluang bagi evaluasi dan perbaikan kinerja kelembagan oraganisasi perangkat daerah.
- c) Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi, pembangunan perumahan dan universitas seperti Universitas Muhamadiyah Banjarmasin, Universitas Islam Kalimantan dan Politeknik Hasnur khususnya di wilayah kecamatan Alalak, kecamatan Mandastana, kecamatan Anjir pasar dan Kecamatan Anjir Muara, sehingga telah meningkatkan jumlah populasi penduduk diwilayah dan sebagai peluang bagi pertumbuhan wilayah lainnya.
- d) Adanya komitmen Pemerintah Daerah untuk menjalankan tugas dan kewenangannya dengan penuh tanggung jawab, bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

- e) Kabupaten Barito Kuala sebagai sentral pertanian utama di Provinsi Kalimantan Selatan.

**b. Ancaman/Treaths (T)**

- a) Potensi terjadinya konflik pertanahan dan social akibat perkembangan perkebunan sawit yang sudah pada tahap produksi.
- b) Tuntutan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang berorientasi reformasi birokrasi dilihat dari capaian nilai indeks reformasi birokrasi yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang terwujud dalam pemerintahan yang baik, bersih dan bebas korupsi konusi dan nepotisme.
- c) Meningkatnya kesadaran masyarakat berdemokrasi akan kehadiran pemerintahan dalam setiap aspek kehidupan social kemasyarakatan.
- d) Belum optimalnya kualitas sistem akuntabilitas kinerja SKPD
- e) Belum Optimalnya upaya peningkatan kualitas pelayanan Publik pada SKPD pelayanan termasuk Kecamatan dan kelurahan.
- f) Adanya produk hukum daerah yang belum dilaksanakan secara optimal pada tataran implementasi dilapangan akan menghambat pencapaian kinerja pemerintah daerah.
- g) Belum rampungnya penyelesaian batas antar kabupaten, antar kecamatan dan antar desa/kelurahan akan berdampak pada kepastian hukum dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.
- h) Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dan perumahan khususnya di wilayah kecamatan Alalak, kecamatan Mandastana, kecamatan Anjir pasar dan Kecamatan Anjir Muara, selain sebagai peluang bagi pertumbuhan wilayah Kab. Barito Kuala secara keseluruhan juga dapat menjadi ancaman bagi ketertiban dan kamanan wilayah.

Tabel 4.1  
MATRIK SWOT

<p><b>KESIMPULAN ANALISIS FAKTOR INTERNAL (KAFI)</b></p> <p><b>KESIMPULAN ANALISIS FAKTOR EKSTERNAL (KAPE)</b></p>	<p><b>RANKING KEKUATAN (S)</b></p>	<p><b>RANKING KELEMAHAN (W)</b></p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sumber daya aparatur secara kuantitas cukup memadai.</li> <li>▪ Adanya komitmen yang kuat dari seluruh anggota organisasi dalam mewujudkan tujuan organisasi.</li> <li>▪ Tugas dan fungsi yang luas dalam penyusunan kebijakan, pengoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah dan pelayanan administratif serta pemantauan dan evaluasi terhdap pelaksanaan kebijakan daerah.</li> <li>▪ Adanya pelimpahan urusan pemerintahan yang luas kepada pemerintah daerah yaitu dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.</li> <li>▪ Adanya peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya.</li> <li>▪ Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Belum optimalnya pelaksanaan fungsi koordinasi yang dilaksanakan oleh unit kerja di Sekretariat Daerah.</li> <li>▪ Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi yang up to date dan akurat sebagai sumber keijakan pemerintah daerah</li> <li>▪ Belum optimalnya manajemen system akuntabilitas kinerja</li> <li>▪ Belum optimalnya pengintegrasian dan sinergitas berbagai potensi sumberdaya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.</li> <li>▪ Belum optimalnya pelaksanaan fungsi pemantauan dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah.</li> <li>▪ Belum optimalnya sistem pengendalian internal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Sekretariat Daerah</li> <li>▪ Kurangnya SDM perancang produk hukum daerah pada bagian Hukum</li> </ul>
<p><b>RANKING PELUANG (O)</b></p>	<p><b>ASUMSI STRATEGI : S-O</b></p>	<p><b>ASUMSI STRATEGI : W-O</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penerapan teknologi informasi dalam Sistem informasi, dan pelayanan public.</li> <li>▪ Dalam memaksimalkan kinerja pemerintah daerah maka setiap 2 tahun Struktur Organisasi Perangkat Daerah dapat dievaluasi, hal ini dapat menjadi peluang bagi evaluasi dan perbaikan kinerja kelembagan oraganisasi perangkat daerah.</li> <li>▪ Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi, pembangunan perumahan dan universitas seperti Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, Universitas Islam Kalimantan dan Politeknik Hasnur khususnya di wilayah kecamatan Alalak, kecamatan Mandastana, kecamatan Anjir pasar dan Kecamatan Anjir Muara, sehingga telah meningkatkan jumlah populasi penduduk diwilayah dan sebagai peluang bagi pertumbuhan wilayah lainnya.</li> <li>▪ Adanya komitmen Pemerintah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan kapasitas dan kapabilitas apartur dalam pelaksanaan TUPOKSI dengan memanfaatkan perkembangan IPTEK.</li> <li>• Peningkatan Sinegritas pengelolaan data akuntabilitas kinerja SKPD</li> <li>• Meningkatkan motivasi dan komitmen seluruh komponen organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi</li> <li>• Meningkatkan kinerja penyelenggaraan otonomi daerah melalui pelaksanaan urusan pemerintahan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan pelayanan administrasi bagi pelaksanaan kelembagaan.</li> <li>• Penguatan pelayanan kepegawaian bagi pelaksanaan tertib admnistrasi kepegawaian.</li> <li>• Penguatan pelayanan perkantoran bagi pelaksanaan kelembagaan.</li> <li>• Optimalisasi pemberian layanan kedinasan bagi bupati dan wakil bupati</li> <li>• Penguatan akuntabilitas kinerja sekretarait daerah</li> <li>• Penguatan Kinerja manajemen pemerintah daerah melalui restrukturisasi kelembagaan, dan pembinaan aparatur organisasi perangkat daerah dalam rangka meningkatkan tingkat kepuasan layanan public</li> <li>• Penguatan piranti pengendali kebijakan penyelenggaraan kegiatan ekonomi dan pembangunan</li> <li>• Pengendalian stabilitas harga kebutuhan pokok</li> </ul>

<p>Daerah untuk menjalankan tugas dan kewenangannya dengan penuh tanggung jawab, bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kabupaten Barito Kuala sebagai sentral pertanian utama di Provinsi Kalimantan Selatan</li> </ul>		
RANKING ANCAMAN (T)	ASUMSI STRATEGI : S-T	ASUMSI STRATEGI : W-T
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Potensi terjadinya konflik pertanahan dan social akibat perkemangan perkebunan sawit yang sudah pada tahap produksi.</li> <li>▪ Tuntutan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang berorientasi reformasi birokrasi dilihat dari capaian nilai indeks reformasi birokrasi yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang terwujud dalam pemerintahan yang baik, bersih dan bebas korupsi konusi dan nepotisme.</li> <li>▪ Meningkatnya kesadaran masyarakat berdemokrasi dan keterukaan informasi penyelenggaraan pemerintahan.</li> <li>▪ Belum Optimalnya upaya peningkatan kualitas pelayanan Publik pada SKPD pelayanan termasuk Kecamatan dan kelurahan.</li> <li>▪ Belum optimalnya kualitas Sistem akuntabilitas kinerja SKPD</li> <li>▪ Adanya produk hukum daerah yang belum dilaksanakan secara optimal pada tataran implementasi dilapangan akan menghambat pencapaian kinerja pemerintah daerah.</li> <li>▪ Belum rampungnya penyelesaian batas antar kabupaten, antar kecamatan dan antar desa/kelurahan akan berdampak pada kepastian hukum dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.</li> <li>▪ Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dan perumahan khususnya di wilayah kecamatan Alalak, kecamatan Mandastana, kecamatan Anjir pasar dan Kecamatan Anjir Muara, selain sebagai peluang bagi pertumbuhan wilayah Kab. Barito Kuala secara keseluruhan juga dapat menjadi ancaman bagi ketertiban dan kemanan wilayah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan jumlah asaet tanah yang memiliki SHP untuk memberikan kepastian hukum tanah asset pemerintah daerah.</li> <li>• Peningkatan fasilitasi penyelesaian batas antar desa/kecamatan</li> <li>• Mengoptimalkan koordinasi dengan pemprov dan pemkab tapin terkait penyelesaian batas dengan kab tapin.</li> <li>• Penetapan dan penerapan regulasi yang mendorong efektifitas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan dalam kerangka reformasi birokrasi.</li> <li>• Peningkatan kualitas SAKIP Kabupaten dan SKPD</li> <li>• Penguatan kualitas layanan pengadaan b/j melalui ULP</li> <li>• Penanganan pengaduan masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• peningkatan kualitas dan kuantitas sarana pemberitaan/kehumasan</li> <li>• Menigkatkan kualitas berita dan cakupan penyebarluasan berita</li> <li>• Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui prbaikan manajemen pelayanan publik</li> <li>• Mendorong pengembangan inovasi kinerja</li> <li>• Meningkatkan Penanganan pengaduan masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan Dalam rangka perwujudan “Good Governance” melalui implementasi transparansi, akuntabilitas dan membuka ruang partisipasi publik</li> <li>• Penguatan piranti pengendali kebijakan kesejahteraan sosial dan keagamaan</li> <li>• Meningkatkan peran serta seluruh lapisan masyarakat dalam pemberian pelayanan</li> <li>• penguatan data dan informasi dasar penyaluran hibah</li> </ul>

Berikut tabel keterkaitan antara rumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah

kebijakan Sekretariat Daerah Tahun 2017-2022.

Tabel 5.2  
Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan  
Sekretariat Daerah Tahun 2017-2022

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>KEBIJAKAN</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1. Menerapkan seluruh kewenangan Sekretariat Daerah	1.1 Meningkatnya manajemen administrasi	Penguatan pelayanan administrasi bagi pelaksanaan kelembagaan.	Menyediakan sarana dasar penunjang administrasi perkantoran
		Penguatan pelayanan kepegawaian bagi pelaksanaan administrasi kepegawaian.	Menyediakan sarana dasar penunjang administrasi kepegawaian
		Penguatan pelayanan perkantoran bagi pelaksanaan kelembagaan.	Menyediakan sarana dan prasarana dasar penunjang kegiatan administrasi kelembagaan.
		Optimalisasi pemberian layanan kedinasan bagi bupati dan wakil bupati	Fasilitasi kegiatan dialog maupun kordinasi pimpinan daerah
	1.2 Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur	Penguatan kapasitas dan kapabilitas aparatur dalam pelaksanaan TUPOKSI dengan memanfaatkan perkembangan IPTEK.	Penyelenggaraan training berupa diklat, bintek yang sifatnya eksternal maupun in house training
	1.3 Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Penguatan akuntabilitas kinerja sekretariat daerah	Penyusunan laporan kinerja
2 Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pradigma reformasi	2.1 Meningkatnya kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah	Peningkatan jumlah aset tanah yang memiliki SHP	Mengajukan pembuatan SHP
		Mengoptimalkan koordinasi dengan pemprov dan pemkab tapin	Koordinasi pendampingan, identifikasi batas bermasalah

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>KEBIJAKAN</b>	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	
birokrasi		Peningkatan fasilitasi penyelesaian batas antar desa/kecamatan	sosialisasi batas	
		Peningkatan kualitas produk hukum daerah	Penanganan sengketa hukum	
			fasilitasi penyusunan produk hukum daerah	
			sosialisasi produk hukum	
			monev implementasi produk hukum	
			Evaluasi produk hukum daerah	
	pengarsipan produk hukum			
	2.2 Meningkatnya transparansi/keterbukaan penyelenggara pemerintahan	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana pemberitaan		Pengembangan media lokal
				pembinaan sumberdaya pengelola informasi
		Meningkatkan kualitas berita dan cakupan penyebarluasan berita		kerjasama pemberitaan
	melaksanakan jumpa pers hasil-hasil pembangunan			
	2.3 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Peningkatan Sinergitas pengelolaan data akuntabilitas kinerja SKPD		Koordinasi pengumpulan data sistem aplikasi data
				workshop LKPJ
Peningkatan Sinergitas pengelolaan data akuntabilitas kinerja SKPD			Koordinasi pengumpulan data, pembangunan sistem aplikasi data dan sosialisasi LPPD	
			Koordinasi pengumpulan data sistem aplikasi data	
Peningkatan Sinergitas pengelolaan data akuntabilitas kinerja SKPD		workshop LKIP		

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	2	3	4
		Peningkatan kualitas SAKIP Kabupaten dan SKPD	Fasilitasi tim SAKIP Kabupaten Fasilitasi pembinaan SAKIP SKPD
		Peningkatan Sinergitas pengelolaan data akuntabilitas kinerja SKPD	Koordinasi pengumpulan data sistem aplikasi data workshop RAN HAM
	2.4 Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan	Penguatan kualitas layanan pengadaan b/j melalui ULP	Fasilitasi dan konsultasi pengadaan B/J Pendataan dan dokumentasi pengadaan B/J
		Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui perbaikan manajemen pelayanan publik	Penilaian kinerja pelayanan skpd Monitoring pelayanan SKPD Survey IKM Pembinaan dan evaluasi pelaksanaan otonomi daerah Perbaikan dan penguatan manajemen pelayanan
		Mendorong pengembangan inovasi kinerja	Fasilitasi, Sosialisasi dan monev inovasi
		Meningkatkan Penanganan pengaduan masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan	Pembuatan media penampung aspirasi/pengaduan masyarakat
	2.5 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan otonomi daerah melalui pelaksanaan urusan pemerintahan.	Koordinasi penyelenggaraan pemilihan umum koordinasi pembentukan

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>KEBIJAKAN</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	dan otonomi daerah		kerjasama antar daerah
			Peringatan hari kebangsaan (HUT RI) dan Hari lahir Kab. Barito Kuala
			Melaksanakan koordinasi, dan evaluasi ketertiban umum
		Penataan kelembagaan dan pembinaan aparatur organisasi perangkat daerah	evaluasi dokumen analisis jabatan dan beban kerja
		Penataan dan penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah	Penataan dan evaluasi perangkat daerah
			Penataan dan evaluasi ketatalaksanaan organisasi perangkat daerah
			Penguatan penerapan kewenangan otonomi daerah
3. Peningkatkan Pengendalian dan pengkoordinasian bidang Pelayanan Sosial	3.1 Tumbuhnya ketaqwaan dan kesejahteraan masyarakat	Penguatan piranti pengendali kebijakan kesejahteraan sosial dan keagamaan	Mengkompilasi informasi dan bahan kebijakan bid kesra
			Memastikan setiap program kesejahteraan masyarakat tepat sasaran dan tepat pemanfaatan
			Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan keagamaan
		Meningkatkan peran serta seluruh lapisan masyarakat dalam pemberian pelayanan	Pembinaan organisasi perempuan

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>KEBIJAKAN</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
	3.2 Terwujudnya Penyaluran Bantuan Sosial yang tepat sasaran	penguatan data dan informasi dasar penyaluran hibah	Fasilitasi penerimaan proposal bantuan Survey kelayakan bantuan
4. Mendorong peningkatan kesejahteraan dan aktifitas perekonomian masyarakat	4.1 Meningkatnya aktifitas perekonomian masyarakat	Penguatan piranti pengendali kebijakan penyelenggaraan kegiatan ekonomi dan pembangunan	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan pusat dan daerah
			Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur publik
			Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan bid perekonomian
		Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan perekonomian lokal	
		Pengendalian stabilitas harga kebutuhan pokok	Koordinasi, dan monev distribusi barang kebutuhan pokok

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dasar arahan program dan kegiatan Sekretariat Daerah dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Tahun 2017-2022 secara umum dibagi menjadi 2 (dua) :

- 1) **Program-kegiatan Teknis** merupakan program-program yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal). Disesuaikan dengan lingkup kewenangan, tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah.
- 2) **Program-kegiatan Generik** merupakan program-program yang digunakan oleh beberapa SKPD yang memiliki untuk mendukung pelayanan aparatur dan/atau administrasi pemerintahan (pelayanan internal).

Karena sifatnya sebagai koordinator, maka program kegiatan Generik ini digunakan pula untuk kegiatan yang tidak bersifat pelayanan internal, sebagai upaya mendukung manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

Dalam penyusunan indikator kinerja pada Program dan Kegiatan, Sekretariat Daerah menggunakan kriteria, meliputi :

- 1) **Relevant**: indikator terkait secara logis dan langsung dengan tugas institusi, serta realisasi tujuan dan sasaran strategis institusi;
- 2) **Spesifik**: definisi indikator jelas dan tidak bermakna ganda sehingga mudah untuk dimengerti dan digunakan;
- 3) **Measurable** : indikator yang digunakan diukur dengan skala penilaian tertentu yang disepakati, dapat berupa pengukuran secara kuantitas, kualitas atau harga.
- 4) **Appropriate**: pemilihan indikator yang sesuai dengan upaya peningkatan pelayanan/kinerja, mendorong tercapainya output kegiatan yang telah ditetapkan.
- 5) **Achivable** : bahwa indikator yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan berdasarkan sumberdaya dan dana yang tersedia.
- 6) **Reliable**: indikator yang digunakan akurat dan dapat mengikuti perubahan tingkatan kinerja;
- 7) **Verifiable**: memungkinkan proses validasi dalam sistem yang digunakan untuk menghasilkan indikator;
- 8) **Cost-effective**: kegunaan indikator sebanding dengan biaya pengumpulan

data.

- 9) **Time** : ada jangka waktu bagi capaian keberhasilan, out put, out come dan imfac, sehingga dapat dilakukan evaluasi berdasarkan periode waktu tertentu. Untuk kegiatan yang memiliki arahan target keluaran, dan waktu pelaksanaan yang sama maka pelaksanaannya disatukan

Adapun daftar program prioritas dalam rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2017-2022, sebagai berikut ;

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Program peningkatan disiplin aparatur
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 5) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- 6) Program pengembangan data/informasi
- 7) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
- 8) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
- 9) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
- 10) Program Lingkungan Sehat Perumahan
- 11) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- 12) Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
- 13) Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)
- 14) Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
- 15) Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
- 16) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
- 17) Program pengembangan wawasan kebangsaan
- 18) Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
- 19) Program kerjasama informasi dengan mas media
- 20) Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
- 21) Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

- 22) Program peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama dan pembinaan kerukunan beragama
- 23) Program perencanaan pembangunan daerah
- 24) Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- 25) Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
- 26) Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan
- 27) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
- 28) Program pembangunan infrastruktur perdesaan
- 29) Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
- 30) Program pembinaan dan pengembangan aparatur
- 31) Program Peningkatan Pelayanan Publik
- 32) Peningkatan kualitas layanan pengadaan barang dan jasa

Lebih jelas gambaran mengenai keterkaitan antara tujuan, sasaran, indikator sasaran, program dan kegiatan serta pendanaan indikatif Sekretariat Daerah Tahun 2017-2022, sebagaimana pada table berikut:

Tabel 6.1  
Rencana Program, Kegiatan, dan pendanaan Sekretariat Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian Awal Tahun	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi		
						2018		2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Akhir periode RENSTRA					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
Menerapkan seluruh kewenangan Sekretariat Daerah	1. Meningkatnya manajemen administrasi	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penyediaan sarana pelayanan administrasi kantor	100	100			100			100			100			100		Bag. Umum	Marabahan
		01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikelola/pengarsipan kantor (materai 900 lbr, perangko 1500 lbr)	3,500	3,500	60,000,000	3,500	60,000,000	3,500	65,000,000	3,500	65,000,000	3,500	65,000,000	17,500	315,000,000			Bag. Umum	Marabahan
		01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah tagihan listrik, TV, Telepon, air	12	12	9,000,000,000	12	9,500,000,000	12	9,500,000,000	12	9,500,000,000	12	9,500,000,000	60	47,000,000,000			Bag. Umum	Marabahan
		01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK yang dikeluarkan untuk perizinan kendaraan jabatan/dinas bermotor roda 4 dan roda 2	54	54	60,000,000	59	75,000,000	59	75,000,000	59	75,000,000	59	75,000,000	290	360,000,000			Bag. Umum	Marabahan
		01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bangunan gedung dan kantor yang dilakukan pemeliharaannya (kantor Bupati/Wakil bupati 1 bh, Kantor Setda 2 bh, Aula 3 bh, halaman 1 bh)	12	12	260,000,000	12	260,000,000	12	260,000,000	12	270,000,000	12	270,000,000	60	1,320,000,000			Bag. Umum	Marabahan
		01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis pengadaan kebutuhan alat tulis kantor Setda Kab. Batola	4,029	4,029	150,000,000	4,029	155,000,000	4,029	160,000,000	4,029	160,000,000	4,029	160,000,000	20,145	785,000,000			Bag. Umum	Marabahan
		01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis cetakan dan pengadaan berkas kantor sebanyak 21 jenis belangko/barang (20 jenis cetak belangko dan 2 jenis pengadaan)	1,039	1,039	110,000,000	1,039	110,000,000	1,039	120,000,000	1,039	120,000,000	1,039	130,000,000	5,195	590,000,000			Bag. Umum	Marabahan

# Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah | 2017-2022

		01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah pembelian komponen listrik penerangan gedung kantor, taman kantor & rumah jabatan Bupati/Wakil Bupati dan Sekda (bolam lampu pijar, kabel gulung, neon, mercury, lampu ser/hias, MCCB/MCB /kontraktor, fotocel, kabel listrik, dinamo dan alat elektronik lainnya)	1,100	1,100	50,000,000	1,100	60,000,000	1,100	60,000,000	1,100	60,000,000	1,100	60,000,000	5,500	290,000,000	Bag. Umum	Marabahan
		01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah peyediaan bahan bacaan surat kabar harian	756	756	65,000,000	756	65,000,000	756	65,000,000	756	65,000,000	756	65,000,000	3,780	325,000,000	Bag. Umum	Marabahan
		01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah porsi makan dan minum untuk kegiatan rapat, tamu bupati /wakil bupati/setda, harian pegawai sekretariat daerah	50,150	#####	800,000,000	51,150	850,000,000	51,150	850,000,000	51,150	850,000,000	51,150	850,000,000	#####	4,200,000,000	Bag. Umum	Marabahan
		01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi tertentu pada instansi vertikal/horizontal terkait dengan lingkup tupoksi sekretariat daerah	144	144	850,000,000	170	850,000,000	170	850,000,000	170	850,000,000	170	850,000,000	824	4,250,000,000	Bag. Umum	Marabahan
		01 . 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan tugas ke kecamatan	170	170	60,000,000	170	60,000,000	190	65,000,000	190	65,000,000	200	705,000,000	920	955,000,000	Bag. Umum	Marabahan
		00 . 00	Non Program	Persentase dokumen administrasi kepegawaian aparatur yang terfasilitasi dan up to date	100	100		100		100		100		100				Bag. Umum	Marabahan

# Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah 2017-2022

	02.20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah pemeliharaan kebersihan rumah jabatan bupati, wakil bupati dan sekda.	3	3	210,000,000	3	210,000,000	3	210,000,000	3	220,000,000	3	220,000,000	15	1,070,000,000	Bag. Umum	Marabahan
	02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung rumah jabatan bupati/wakil bupati yang dipelihara	100	100	81,070,000	100	80,000,000	100	80,000,000	100	80,000,000	100	80,000,000	500	401,070,000	Bag. Umum	Marabahan
	02.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil dinas yang dipelihara	12	12	604,320,000	12	630,000,000	12	630,000,000	12	650,000,000	12	650,000,000	60	3,164,320,000	Bag. Umum	Marabahan
			Persentase data pegawai PNS yang dipelihara	100	100		100		100		100		100		100		Bag. Umum	Marabahan
			Persentase usulan penggantian suku cadang, service, dan PNS teradministrasi pemaduan	100	100		100		100		100		100		100		Bag. Umum	Marabahan
			Kebersihan banalkaraji berkala PNS jasa	100	100		100		100		100		100		100		Bag. Umum	Marabahan
			Kebersihan banalkaraji berkala PNS jasa	100	100		100		100		100		100		100		Bag. Umum	Marabahan
			Kebersihan banalkaraji berkala PNS jasa	100	100		100		100		100		100		100		Bag. Umum	Marabahan
	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Peningkatan sarana dan prasarana	100	100		100		100		100		100		100		Bag. Umum	Marabahan
	02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional gedung kantor	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara berupa	12	12	761,520,000	12	900,000,000	12	900,000,000	12	900,000,000	12	900,000,000	60	4,361,520,000	Bag. Umum	Marabahan
	02.03	Pengadaan mobil jabatan	Jumlah pembelian kendaraan dinas yang dipelihara berupa	31	31	10,075,000	-	-	-	-	-	-	-	-	31	10,075,000	Bag. Umum	Dalam Kabupaten
	02.04	Pengadaan kendaraan operasional	Jumlah pembelian kendaraan dinas yang dipelihara berupa	14	14	1,312,100,000	1	2,000,000,000	-	-	-	-	-	-	15	3,312,100,000	Bag. Umum	Marabahan
	02.06	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas	122	122	1,230,000,000	122	1,230,000,000	122	1,230,000,000	122	1,230,000,000	122	1,230,000,000	610	6,230,000,000	Bag. Umum	Marabahan
	02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pembelian perlengkapan gedung kantor	4	4	7,500,000	-	-	4	10,000,000	-	-	4	10,000,000	12	27,500,000	Bag. Umum	Marabahan
	02.08	Pengadaan peralatan rumah jabatan	Jumlah pembelian peralatan rumah jabatan	4	4	100,000,000	4	100,000,000	4	100,000,000	4	100,000,000	7	250,000,000	23	650,000,000	Bag. Umum	Marabahan
	02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pembelian peralatan gedung kantor	5	5	100,000,000	5	100,000,000	5	100,000,000	5	100,000,000	5	100,000,000	25	500,000,000	Bag. Umum	Marabahan
	02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah pembelian mebeleur	209	209	94,500,000	209	95,000,000	209	95,000,000	209	95,000,000	209	95,000,000	1,045	474,500,000	Bag. Umum	Marabahan
	02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah pembelian mebeleur	4	4	100,000,000	4	100,000,000	4	100,000,000	-	-	10	500,000,000	22	800,000,000	Bag. Umum	Marabahan
	02.30	Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman	Luas taman (berikut jumlah tanaman hias) (400 m2) yang dipelihara	12	12	38,452,000	12	45,000,000	12	45,000,000	12	45,000,000	12	45,000,000	60	218,452,000	Bag. Umum	Marabahan

# Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah | 2017-2022

		02.40	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Jumlah bangunan gudang rumah jabatan	3	3	116,340,000	3	100,000,000	3	100,000,000	3	100,000,000	15	516,340,000	Bag. Umum	Marabahan		
		02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah bangunan gudang kantor sekretariat daerah	3	3	224,070,000	3	100,000,000	3	100,000,000	3	100,000,000	15	624,070,000	Bag. Umum	Marabahan		
		03.16	<b>Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah</b>	<b>Persentase terfasilitasinya kegiatan kedinasan kepala daerah</b>	100	100		100		100		100		100		Bag. Umum	Kab. Barito Kuala		
		16.01	Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	Jumlah peserta dialog antara pemerintah daerah dengan tokoh masyarakat dan pimpinan/anggota organisasi kemasyarakatan yang dilaksanakan	9,180	9,180	241,900,000	13,600	360,000,000	13,600	360,000,000	13,600	360,000,000	13,600	360,000,000	63,580	1,681,900,000	Bag. Umum	Kab. Barito Kuala
		16.04	Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah	Jumlah rapat koordinasi antar pimpinan daerah	-	-	-	4	30,000,000	4	30,000,000	4	30,000,000	4	30,000,000	16	120,000,000	Bag. Umum	Marabahan
		16.06	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Jumlah pelaksanaan konsultasi dan koordinasi KDH	60	60	675,050,000	80	900,000,000	80	900,000,000	80	900,000,000	80	900,000,000	380	4,275,050,000	Bag. Umum	Luar Kabupaten
		16.07	Fasilitasi keprotokolan kepala daerah/wakil kepala daerah	Jumlah kegiatan KDH difasilitasi (keprotokolan)	-	-	-	200	25,000,000	200	25,000,000	200	25,000,000	200	25,000,000	800	100,000,000	Bag. Humpro	Kab. Barito Kuala
		03	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>Persentase pemenuhan pakaian khusus hari-hari tertentu bagi PNS dan kepala daerah</b>	100	100		100		100		100		100		Bag. Umum	Marabahan		
		03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah kartu tanda pengenal ASN yang dibagikan	600	600	12,300,000	600	13,000,000	600	13,000,000.00	600	13,000,000.00	600	13,000,000.00	3,000	64,300,000	Bag. Organisasi	Marabahan
		03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pembelian pakaian khusus hari-hari tertentu (PSH :8 stel, PSL : 8 stel, PDH : 17stel, PDU : 2 stel, PSR 6 stel, PDL 4 stel, korpri 3 stel, kebaya/batik 10 stel, olah raga 4 stel, acara kedinasan lainnya 10 stel	72	72	257,700,000	72	260,000,000	72	260,000,000	72	260,000,000	72	260,000,000	360	1,297,700,000	Bag. Umum	Marabahan

# Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah | 2017-2022

	2. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur	03 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase aparatur yang yg mengikuti diklat/bintek</b>		11		23		34		45		57		170	-	Bag. Umum	Marabahan
		05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang ditugaskan mengikuti Diklat	4	2	21,000,000	4	44,000,000	4	44,000,000	4	44,000,000	4	44,000,000	18	197,000,000	Bag. Umum	Kab. Barito Kuala
		05 . 02	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang ditugaskan mengikuti Bintek	-	-	-	5	70,000,000	5	70,000,000	5	70,000,000	5	70,000,000	20	280,000,000	Bag. Umum	Kab. Barito Kuala
	3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja	03 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Persentase pemenuhan dokumen akuntabilitas Sekretariat Daerah</b>	100	100		100		100		100		100		100		Bag. Umum	Marabahan
		06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP Sekretariat Daerah Tahun n-1, dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) setda tahun n+1 & DPA perubahan setda tahun n yg disusun.	3	3	16,775,000	3	17,000,000	3	17,000,000.00	3	17,000,000.00	3	17,000,000.00	15	84,775,000	Bag. Umum	Marabahan
		06 . 02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran, yang tersusun.	1	1	1,030,000	1	1,100,000	1	1,100,000.00	1	1,100,000.00	1	1,100,000.00	5	5,430,000	Bag. Umum	Marabahan
		06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun, yang tersusun.	1	1	1,355,000	1	1,400,000	1	1,400,000.00	1	1,400,000.00	1	1,400,000.00	5	6,955,000	Bag. Umum	Marabahan
		06 . 00	Verifikasi laporan SPJ keuangan	Persentase terverifikasinya laporan SPJ keuangan	100	100		100		100		100		100		100		Bag. Umum	Marabahan

# Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah | 2017-2022

Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka dan melayani	1. Meningkatnya kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah	03 . 16	<b>Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah</b>	<b>Jumlah aset tanah pemerintah daerah yang memiliki SHP (persil)</b>		5		5		5		5		5		25	-	Bag. Pemerintahan	Kab. Barito Kuala
		16 . 04	Pembuatan sertifikat hak milik tanah aset pemerintah daerah	Jumlah bidang tanah Pemerintah Daerah yang diajukan Sertifikat Hak Pakai (SHP)		5	49,770,000	5	50,000,000	5	50,000,000	5	50,000,000	5	50,000,000	25	249,770,000	Bag. Pemerintahan	Kab. Barito Kuala
		16 . 00	Inventarisasi pemilikan dan pemanfaatan tanah daerah	Jumlah tanah aset pemerintah daerah yg diinventarisir				50	20,000,000	50	20,000,000	50	20,000,000	50	20,000,000	200	80,000,000	Bag. Pemerintahan	Kab. Barito Kuala
		03 . 17	<b>Program Pengembangan Wilayah Perbatasan</b>	<b>Persentase fasilitasi penyelesaian batas administratif wilayah antar kecamatan, desa, kelurahan dalam kabupaten Kab. Barito Kuala dan dengan Kabupaten tetangga.</b>		14		18		24		22		30		108	-	Bag. Pemerintahan	Kab. Barito Kuala
		17 . 01	Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah	Jumlah titik batas wilayah administrasi kabupaten bari to kuala dengan kabupaten tetangga yg di tangani		5	23,670,000	5	25,000,000	5	25,000,000	5	30,000,000	5	30,000,000	25	133,670,000	Bag. Pemerintahan	Kab. Barito Kuala
		17 . 06	Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah dalam kabupaten	Jumlah titik batas wilayah administrasi antar kecamatan / desa / kelurahan yg diselesaikan		14	19,000,000	18	40,000,000	24	40,000,000	22	40,000,000	30	40,000,000	108	179,000,000	Bag. Pemerintahan	Kecamatan
		17 . 07	Sosialisasi kebijakan batas administrasi antar daerah	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan batas administrasi		50	6,091,200	50	15,000,000	50	15,000,000	50	15,000,000	50	15,000,000	250	66,091,200	Bag. Pemerintahan	Kab. Barito Kuala
		03 . 26	<b>Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan</b>	<b>Persentase tersedianya produk hukum daerah yang berkualitas/sesuai peraturan pembentukan perundang-undangan</b>	100	100		100		100		100		100		100	100	Bag. Hukum	Kab. Barito Kuala

# Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah | 2017-2022

		26.01	Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	Jumlah penanganan perkara/sengketa/masalah masalah hukum yang melibatkan instansi/aparatur	2	2	40,025,000	2	41,000,000	2	41,000,000	2	41,000,000	2	41,000,000	10	204,025,000	Bag. Hukum	Kab. Barito Kuala
		26.03	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	Jumlah produk hukum daerah di ajukan (RAPERDA)	10	10	140,618,750	10	145,000,000	10	145,000,000	10	145,000,000	10	150,000,000	50	725,618,750	Bag. Hukum	Kab. Barito Kuala
		26.07	sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah masyarakat (peserta) sosialisasi produk hukum	250	250	39,011,800	250	45,000,000	250	45,000,000	250	45,000,000	250	45,000,000	1,250	219,011,800	Bag. Hukum	Kab. Barito Kuala
		26.08	Evaluasi Produk Hukum Daerah	Jumlah Laporan evaluasi produk Hukum daerah		-	-	1	7,000,000	1	7,000,000	1	7,000,000	1	7,000,000	4	28,000,000	Bag. Hukum	Marabahan
		26.09	Dokumentasi Produk Hukum Daerah	Jumlah produk hukum daerah yang tersiapkan dengan baik (manual / elektronik)		-	-	400	5,000,000	400	5,000,000	400	5,000,000	400	5,000,000	1,600	20,000,000	Bag. Hukum	Marabahan
		03.16	<b>Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah</b>	<b>Persentase produk hukum daerah yg terserfikan (Perda, Perbup dan SK Bupati)</b>	100	100		100		100		100		100	100			Bag. Hukum	Marabahan
		16.02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Jumlah produk hukum daerah yang terserfikan dengan baik (manual / elektronik)		395	3,027,500	400	3,100,000	400	3,100,000	400	3,100,000	400	3,500,000	1,995	15,827,500	Bag. Hukum	Marabahan
	2. Meningkatkan transparansi/ keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan	03.15	<b>Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa</b>	<b>Persentase kegiatan pemeritahan dan pembangunan yang dipublikasikan</b>		%	100		100		100		100		100	100		Bag. Humpro	Kab. Barito Kuala
		2.10.4.01.03.15.02	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Jangkauan penyebarluasan informasi daerah melalui LPPLRSPK "Ije Jela FM" (kecamatan)		17	91,537,000	12	95,000,000	12	95,000,000	12	95,000,000	12	95,000,000	65	471,537,000	Bag. Humpro	Kab. Barito Kuala
		15.03	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi		100	28,140,000	100	28,140,000	-	-	-	-	-	-	200	56,280,000	Bag. Humpro	Marabahan
		15.04	Pengadaan alat studio dan komunikasi	Jumlah peralatan studio		1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	5	125,000,000	Bag. Humpro	Marabahan

# Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah | 2017-2022

		03 . 18	Program kerjasama informasi dengan mas media	Persentase kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang dipublikasikan		%	100		100		100		100		100		100	Bag. Humpro	Kab. Barito Kuala
		18 . 01	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Jumlah oplah terbitan media bulanan Batola Membangun		12	260,400,000	12	265,000	12	265,000	12	270,000	12	270,000	60	261,470,000	Bag. Humpro	Kab. Barito Kuala
		18.02	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Jumlah penayangan/terbitan Informasi/berita penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Barito Kuala melalui berbagai media cetak maupun elektronik lokal maupun nasional.		1,535	2,057,330,000	2	66,000,000	2	66,000,000	2	66,000,000	2	66,000,000	1,543	2,321,330,000	Bag. Humpro	Kab. Barito Kuala
		18.03	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Jumlah peserta yang mengikuti jumpa pers		180	18,990,000	180	19,500,000	180	20,000,000	180	20,000,000	180	20,000,000	900	98,490,000	Bag. Humpro	Marabahan
		18.04	Penyebarluasan informasi pemerintahan dan pembangunan melalui media lokal	Jumlah kerjasama pemberitaan melalui media lokal		-	-	1,107	1,400,000,000	1,107	1,500,000,000	1,107	1,500,000,000	1,107	1,500,000,000	4,428	5,900,000,000	Bag. Humpro	Kab. Barito Kuala
		18.05	Penyebarluasan informasi pemerintahan dan pembangunan melalui media regional	Jumlah kerjasama pemberitaan melalui media regional		-	-	355	700,000,000	355	700,000,000	355	700,000,000	355	700,000,000	1,420	2,800,000,000	Bag. Humpro	Regional
		18.06	Penyebarluasan informasi pemerintahan dan pembangunan melalui media nasional	Jumlah kerjasama pemberitaan melalui media nasional		-	-	37	100,000,000	37	100,000,000	37	100,000,000	37	100,000,000	148	400,000,000	Bag. Humpro	Nasional
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	03 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase fasilitasi ketersediaan dokumen akuntabilitas kinerja kabupaten tepat isi dan waktu	100	100		100		100		100		100		100		Bag. Pemerintahan	Marabahan
		21 . 12	Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Jumlah laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kab. Barito Kuala, yang disusun.		2	22,720,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	2	35,000,000	6	132,720,000	Bag. Pemerintahan	Marabahan

# Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah | 2017-2022

		03 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase fasilitasi ketersediaan dokumen akuntabilitas kinerja kabupaten tepat isi dan waktu	100	100		100		100		100		100			Bag. Pemerintahan	Marabahan	
		21 . 15	Koordinasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah	laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) kab. bari to kuala yang disusun	1	1	36,870,000	1	40,000,000	1	40,000,000	1	40,000,000	1	40,000,000	5	196,870,000	Bag. Pemerintahan	Marabahan
		03 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase fasilitasi ketersediaan dokumen akuntabilitas kinerja kabupaten tepat isi dan waktu	100	100		100		100		100		100			Bag. Organisasi	Kab. Barito Kuala	
		21 . 11	Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen LKIP kabupaten yg disusun.	1	1	42,455,000	1	45,000,000	1	45,000,000	1	45,000,000	1	45,000,000	5	222,455,000	Bag. Organisasi	Kab. Barito Kuala
		21 . 00	Non Kegiatan	Persentase SKPD yang menyampaikan LKIP	100	100		100		100		100		100			Bag. Organisasi	Kab. Barito Kuala	
		03 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase fasilitasi ketersediaan dokumen akuntabilitas kinerja kabupaten tepat isi dan waktu	100	100		100		100		100		100			Bag. Organisasi	Kab. Barito Kuala	
		21 . 16	Fasilitasi penguatan SAKIP SKPD	Jumlah SAKIP SKPD yg di bina	47	-	-	47	45,000,000	47	45,000,000	47	45,000,000	47	45,000,000	188	180,000,000	Bag. Organisasi	Kab. Barito Kuala
		03 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase fasilitasi ketersediaan dokumen akuntabilitas kinerja kabupaten tepat isi dan waktu	100	100		100		100		100		100			Bag. Hukum	Kab. Barito Kuala	
		21 . 14	Penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM	Jumlah dokumen Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM yang disusun.	1	1	15,520,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	5	95,520,000	Bag. Hukum	Kab. Barito Kuala

# Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah | 2017-2022

4. Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan	03 . 15	<b>Program pengembangan data/informasi</b>	<b>Persentase lelang B/J yg dilaksanakan melalui ULP</b>		100		-	-	-	-	-	-	-	100	-	Bag. P2BJ	Kab. Barito Kuala	
	15 . 08	Penyusunan dan analisis data/informasi pengadaan dan jasa	Jumlah dokumen data rencana (1 laporan) dan informasi evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa melalui sistem LPSE (3 laporan), dan ULP, yang disusun.		9	356,430,000	-	-	-	-	-	-	-	9	356,430,000	Bag. P2BJ	Kab. Barito Kuala	
	03 . 15	<b>Peningkatan layanan pengadaan barang dan jasa</b>	<b>Persentase pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan</b>		100		100		100		100		100	500		Bag. LPSE	Marabahan	
	00 . 00	Fasilitasi layanan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	Jumlah pengadaan bj yg difasilitasi		-	-	4	430,000,000	4	420,000,000	4	420,000,000	4	420,000,000	16	1,690,000,000	Bag. LPSE	Marabahan
	00 . 00	Fasilitasi penyusunan rencana pengadaan barang dan jasa	Jumlah SKPD menyusun rencana umum pengadaan barang dan jasa		1	-	47	5,000,000	47	5,000,000	47	5,000,000	47	5,000,000	188	20,000,000	Bag. LPSE	Marabahan
	00 . 00	Pendataan dan dokumentasi pengadaan barang dan jasa	Jumlah dokumen pengadaan barang dan jasa yang diarpikan		1	-	47	5,000,000	47	5,000,000	47	5,000,000	47	5,000,000	188	20,000,000	Bag. LPSE	Marabahan
	00 . 00	Moni toring evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan moni toring pelaksanaan pengadaan barang dan jasa SKPD		-	-	2	7,000,000	2	7,000,000	2	7,000,000	2	7,000,000	8	28,000,000	Bag. LPSE	Kab. Barito Kuala
	03 . 31	<b>Program Peningkatan Pelayanan Publik</b>	<b>Persentase SKPD Pelayanan yang memiliki nilai kinerja pelayanan ≥80</b>		26		31		52		45		52	52	-	Bag. Organisasi	Kab. Barito Kuala	
	31 . 04	Survey indeks kepuasan masyarakat	Jumlah SKPD/unit kerja melaksanakan dan menyampaikan hasil survey IKM		46	34,465,000	45	40,000,000	45	40,000,000	45	40,000,000	45	40,000,000	226	194,465,000	Bag. Organisasi	Kab. Barito Kuala
	31 . 07	Moni toring dan evaluasi	Jumlah dokumen money pelayanan publik		-	-	1	6,000,000	1	6,000,000	1	6,000,000	1	6,000,000	4	24,000,000	Bag. Organisasi	Kab. Barito Kuala
31 . 08	Kompetisi unit pelayanan publik	Jumlah SKPD/instansi yang mengikuti penilaian Kinerja pelayanan publik		69	39,059,900	69	40,000,000	69	40,000,000	69	40,000,000	69	40,000,000	345	199,059,900	Bag. Organisasi	Kab. Barito Kuala	
31 . 09	Koordinasi implementasi kewenangan pemerintah	Jumlah dokumen evaluasi pelimpahan kewenangan bupati ke Camat		1	26,892,500	-	-	-	-	-	-	-	-	1	26,892,500	Bag. Pemerintahan	Kab. Barito Kuala	

# Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah | 2017-2022

		28	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Persentase SKPD/Instansi yang menerapkan dokumen Standar Operasional Prosedur													Bag. Organisasi	Marabahan	
		28.01	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	jumlah dokumen SOP kerja dan pelayanan yang diterbitkan (Peraturan Bupati).	160	-	-	100	17,000,000	-	-	100	17,000,000	-	-	200	34,000,000	Bag. Organisasi	Marabahan
		28.02	Monitoring evaluasi dan pelaporan	jumlah laporan evaluasi pelaksanaan SOP	-	-	-	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	1	5,000,000	4	20,000,000	Bag. Organisasi	Kab. Barito Kuala
		03 . 23	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Jumlah inovasi pelayanan publik mengikuti SINOVIK		1		1		1		1		1		5		Bag. Organisasi	Marabahan
		23 . 01	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	Jumlah inovasi kinerja yang dikembangkan dan diterapkan	5	5	59,875,000	5	65,000,000	5	65,000,000	5	65,000,000	5	65,000,000	25	319,875,000	Bag. Organisasi	Marabahan
		23 . 01	Monitoring dan evaluasi	Jumlah inovasi kinerja yang dimonitoring	5	5	5,000,000	5	5,000,000	5	5,000,000	5	5,000,000	5	5,000,000	25	25,000,000	Bag. Organisasi	Marabahan
		03 . 24	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjut SKPD		100		100		100		100		100		500		Bag. Humpro	Kab. Barito Kuala
		24.02	Fasilitasi penanganan pengaduan masyarakat	Persentase pengaduan masyarakat yg diterima dan diverifikasi	100	100	10,200,000	100	11,000,000	100	11,000,000	100	11,000,000	100	11,000,000	500	54,200,000	Bag. Humpro	Kab. Barito Kuala
	5. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan otonomi daerah	03 . 23	Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum	Persentase kelancaran pelaksanaan pemilihan umum		-	-	100		-	-	100		100		300		Bag. Pemerintahan	Kab. Barito Kuala
		23 . 01	Koordinasi Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu***	Jumlah pelaksanaan pemilihan umum yg dikordinasikan	1	-	-	2	110,000,000	-	-	1	100,000,000	1	100,000,000	4	310,000,000	Bag. Pemerintahan	Kab. Barito Kuala
		03 . 25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase kerjasama antar pemerintah daerah yang terealisasi/ditindak lanjut		100		100		100		100		100		500		Bag. Pemerintahan	Kab. Barito Kuala
		25.05	Fasilitasi pembentukan kerjasama daerah	Jumlah kerjasama daerah yang terfasilitasi		-	-	15	25,000,000	15	25,000,000	15	25,000,000	15	25,000,000	60	100,000,000	Bag. Pemerintahan	Kab. Barito Kuala

# Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah | 2017-2022

		<b>03 . 17</b>	<b>Program pengembangan wawasan kebangsaan</b>	<b>Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap peringatan nilai kebangsaan</b>		100		100		100		100		500	-	Bag. Pemerintahan	Marabahan	
		17 . 03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah Peringatan Hari Jadi Kab.Barito Kuala, HUT RI		2	1,557,513,500	2	1,600,000,000	2	1,600,000,000	2	1,700,000,000	10	8,057,513,500	Bag. Pemerintahan	Marabahan	
		<b>03 . 15</b>	<b>Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>	<b>Persentase fasilitasi penyelesaian ketertiban umum</b>		100		100		100		100		500		Bag. Pemerintahan	Kab. Barito Kuala	
		15 . 09	Koordinasi Pengendalian Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi tibun		10	32,810,000	10	34,000,000	10	34,000,000	10	34,000,000	50	168,810,000	Bag. Pemerintahan	Kab. Barito Kuala	
		<b>03 . 30</b>	<b>Program pembinaan dan pengembangan aparatur</b>	<b>Persentase jabatan pada SKPD yg telah dievaluasi</b>		100		-	-	-	100		-	200	-	Bag. Organisasi	Kab. Barito Kuala	
		4 . 30 . 06	Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS	Jumlah jabatan yang memiliki Anjab pada SKPD yg sdh dievaluasi		30	28,750,000	30	35,000,000	-	-	30	45,000,000	-	108,750,000	Bag. Organisasi	Kab. Barito Kuala	
		30 . 20	Penyusunan instrumen analisis beban kerja	Jumlah jabatan yang memiliki ABK pada SKPD yg sdh dievaluasi		30	12,420,000	30	15,000,000	-	-	30	25,000,000	-	52,420,000	Bag. Organisasi	Kab. Barito Kuala	
		30 . 21	Pembinaan aparatur agen perubahan	Jumlah aparatur agen perubahan yang dibina				50	20,000,000	-	-	-	0	-	20,000,000	Bag. Organisasi	Kab. Barito Kuala	
		<b>03 . 27</b>	<b>Program Penataan Daerah Otonomi Baru</b>	<b>Persentase kelembagaan SKPD yg telah dievaluasi</b>		-	-	100		-	-	-	100	200	-	Bag. Organisasi	Kab. Barito Kuala	
		27 . 05	Penyusunan, penataan dan evaluasi Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah organisasi perangkat daerah yang dievaluasi		-	-	30	20,000,000	-	-	-	30	20,000,000	60	40,000,000	Bag. Organisasi	Kab. Barito Kuala
		27 . 06	Penataan ketatalaksanaan organisasi perangkat daerah	Jumlah pembinaan dan evaluasi penerapan ketatalaksanaan organisasi Perangkat Daerah (SPM/SOP/DI)		-	-	195	25,000,000	47	50,000,000	47	25,000,000	336	125,000,000	Bag. Organisasi	Kab. Barito Kuala	
		27 . 07	Koordinasi penerapan kewenangan otonomi daerah	Jumlah pembinaan dan dok evaluasi penyelenggaraan otonomi daerah		-	-	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	4	120,000,000	Bag. Pemerintahan	Kab. Barito Kuala	

# Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah | 2017-2022

Meningkatkan Pengendalian dan pengkoordinasian bidang Pelayanan Sosial	Tumbuhnya ketaqwaan dan kesejahteraan masyarakat	03 . 16	<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>	<b>Persentase kebijakan bidang kersa yang berjalan efektif</b>		100		100		100		100		100			Bag. Kesra	Kab. Barito Kuala	
		16 . 07	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Jumlah kebijakan kesejahteraan sosial, kodan kemasyarakatan yg dikoordinasikan/ PMKS dibantu		217	49,125,000	217	50,000,000	217	60,000,000	217	60,000,000	217	60,000,000	1,085	279,125,000	Bag. Kesra	Kab. Barito Kuala
		16 . 11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen laporan hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan peningkatan kesejahteraan, kemasyarakatan dan keagamaan yang di susun		4	67,383,900	4	70,000,000	4	70,000,000	4	70,000,000	4	70,000,000	20	347,383,900	Bag. Kesra	Kab. Barito Kuala
		03 . 19	<b>Program peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama dan pembinaan kerukunan beragama</b>	<b>Persentase terfasilitasinya agenda peningkatan pengamalan nilai-nilai keagamaan</b>		100		100		100		100		100			Bag. Kesra	Kab. Barito Kuala	
		19 . 01	MTQ Tingkat Kabupaten	Jumlah MTQ Tk. Kabupaten, Tk. Provinsi dan Tk Nasional		3	955,185,500	3	1,000,000,000	3	1,100,000,000	3	1,100,000,000	3	1,100,000,000	15	5,255,185,500	Bag. Kesra	Kab. Barito Kuala
		19 . 02	Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai keagamaan	Jumlah pelaksanaan kegiatan hari-hari besar keagamaan		15	1,997,320,000	15	2,000,000,000	15	2,000,000,000	15	2,000,000,000	15	2,000,000,000	75	9,997,320,000	Bag. Kesra	Kab. Barito Kuala
		03 . 18	<b>Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan</b>	<b>Jumlah kelembagaan organisasi wanita berjalan aktif</b>		1		1		1		1		1	5		Bag. Organisasi	Marabahan	
		18 . 01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Jumlah kelembagaan organisasi yang dibina		150	98,270,000	150	100,000,000	150	100,000,000	150	100,000,000	150	100,000,000	750	498,270,000	Bag. Organisasi	Marabahan

# Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah 2017-2022

		03 .	Program	Persentase		100		100		100		100		100		500		Bag.	Kab.
	Terwujudnya Penyaluran Bantuan Sosial yang tepat sasaran	16.00.00	Program Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	kebijakan bidang pertanian yang berjalan efektif pemohonan bantuan bidang pertanian yang telah tertera yang dilanjutkan keblakan untuk bersubsidi														Ekobang	Kab. Barito Kuala
		16.08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian	Jumlah dokumen bantuan bidang pertanian yang telah tertera yang dilanjutkan keblakan untuk bersubsidi		4	11,196,000	4	12,000,000	4	12,000,000	4	12,000,000	4	12,000,000	20	59,196,000	Bag. Ekobang	Kab. Barito Kuala
		16.24	Koordinasi perumusan kebijakan bertanahan dan infrastruktur pertanian dan perdesaan	Jumlah fasilitasi dan koordinasi bantuan bidang perumusan kebijakan bertanahan dan infrastruktur pertanian yang di tindak lanjuti sesuai ketentuan				4	5,000,000	4	5,000,000	4	5,000,000	4	5,000,000	16	20,000,000	Bag. Ekobang	Kab. Barito Kuala
		16.31	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen bantuan bidang implementasi kebijakan pertanian dan perdesaan		100	30,860,000	100	30,860,000	100	31,000,000	100	31,000,000	100	31,000,000	10	154,720,000	Bag. Ekobang	Kab. Barito Kuala
		03.17	Program Pengembangan Program Lingkungan Sehat Perumahan Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil	Jumlah kebijakan yang dikembangkan perumahan yang di monitoring berjalan efektif		2		2	2	2	2	2	2	2	2			Bag. Ekobang	Kab. Barito Kuala
Mendorong peningkatan kesejahteraan dan aktifitas perekonomian masyarakat	Meningkatnya aktifitas perekonomian masyarakat	03.16	Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil	Persentase perkeonomian lokal yang dikembangkan perumahan yang di monitoring berjalan efektif		100		100	100	100	100	100	100	100	500			Bag. Ekobang	Kab. Barito Kuala
		16.10.01	Koordinasi pengembangan kebijakan dan pengendalian program pelaksanaan peningkatan kebijakan tentang ekonomi lokal	Jumlah koordinasi dan supervisi kebijakan dan pengendalian ekonomi lokal yang di susun		4	15,060,000	4	17,000,000	4	17,000,000	4	17,000,000	4	17,000,000	20	84,430,000	Bag. Ekobang	Kab. Barito Kuala
		17.11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah kebijakan yang dikembangkan perumahan yang di monitoring berjalan efektif				2	15,000,000	2	15,000,000	2	15,000,000	2	15,000,000	8	60,000,000	Bag. Ekobang	Kab. Barito Kuala
		03.30	Program pembangunan	Persentase pembangunan		100		100	100	100	100	100	100	100	500			Bag. Ekobang	Kab. Barito Kuala
		03.18	Infrastruktur perdesaan	Infrastruktur publik stabilitas harga kebutuhan perdesaan														Bag. Ekobang	Kab. Barito Kuala
		30.06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen evaluasi		2	30,360,000	2	35,000,000	2	35,000,000	2	35,000,000	2	35,000,000	10	170,360,000	Bag. Ekobang	Kab. Barito Kuala
		18.08	Pengendalian inflasi Daerah	Jumlah realisasi pembangunan fisik prasarana yang disusun.		4	36,420,000	4	40,000,000	4	40,000,000	4	40,000,000	4	40,000,000	20	196,420,000	Bag. Ekobang	Kab. Barito Kuala

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan Bidang urusan pada Sekretariat daerah dapat dijelaskan pada table berikut ini:

Tabel 7.1  
Indikator Kinerja Sekretariat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Persentase produk hukum daerah yg dievaluasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Nilai LPPD	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
3	Nilai SAKIP Kabupaten Komponen Laporan	8,12	10	11	12	13	15	15
4	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai IKM Pemkab	82	85	87	89	91	93	93

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Dari seluruh uraian yang tersaji pada setiap Bab dalam buku ini, dengan masing-masing cakupan isinya secara keseluruhan saling berkaitan dan merupakan rangkaian rencana Strategis pengelolaan organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala untuk jangka waktu Tahun 2017- 2022.

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Tahun 2017 – 2022 merupakan komitmen perencanaan dari Pemangku Kepentingan di Sekretariat Daerah yang berfungsi sebagai alat bantu dan tolak ukur dalam melaksanakan dan mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2017-2022.

Uraian pada Bab II dan Bab III masing-masing dengan kedalaman materi substantif terkait bidang tugas Sekretaris Daerah, yakni masalah kinerja pelayanan dan isu-isu strategis pelaksanaan tugas dan fungsi kedepan. Sedangkan Bab. IV sampai dengan Bab VI merupakan rangkaian proses perumusan rencana Strategis sehingga diperoleh rumusan strategi serta kebijakan pencapaian tujuan dan sasaran Strategis . Perpaduan kedua materi rumusan tersebut diharapkan dapat menambah kualitas rencana Strategis yang disusun sehingga benar –benar dapat memperbaiki kinerja organisasi.

Demikian Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2017-2022 ini disajikan, sebagai gambaran terukur dan sistematis atas upaya pencapaian Visi dan Misi Sekretariat Daerah Tahun 2017-2022.